



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 16

TAHUN 2022

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA DEPOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan Daerah, Pemerintah Daerah menyusun sistem akuntansi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 21 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Depok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 76 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 21 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Depok;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Daerah yang mengatur mengenai sistem akuntansi pemerintah daerah ditetapkan paling lama tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Depok;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA DEPOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Daerah Kota, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.
8. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
9. Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat PUSAP, adalah pedoman bagi Pemerintah dalam rangka penyusunan Sistem Akuntansi Pemerintahan yang mengacu pada SAP berbasis Akrual dan penerapan statistik keuangan pemerintah daerah untuk penyusunan konsolidasi fiskal dan statistik keuangan secara nasional.
10. Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya disingkat SAPD, adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah Kota Depok.

11. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Kota Depok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
12. Bagan Akun Standar, yang selanjutnya disingkat BAS, adalah kode perkiraan buku besar akuntansi yang terdiri dari kumpulan akun nominal dan akun riil secara lengkap yang digunakan di dalam pembuatan jurnal, buku besar, neraca lajur, neraca percobaan, dan laporan keuangan.
13. Basis AkruaI adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
14. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
15. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.
16. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.
17. Pengungkapan adalah berupa laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.

18. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
19. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LP-SAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
20. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
21. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
22. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
23. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
24. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.

25. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
26. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
27. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
28. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
29. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
30. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
31. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
32. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

33. Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
34. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
35. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
36. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
37. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
38. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
39. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.

BAB II
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Sistem akuntansi pemerintah daerah terdiri dari:

- a. Sistem Akuntansi Pendapatan;
- b. Sistem Akuntansi Belanja dan Beban;
- c. Sistem Akuntansi Pembiayaan;
- d. Sistem Akuntansi Non Anggaran; dan
- e. Sistem Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Sistem akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan e tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2021 dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota Depok Nomor 21 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Depok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 76 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 21 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Depok.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan tentang sistem akuntansi pemerintah daerah di Kota Depok dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 21 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor 21); dan
- b. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 76 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 21 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor 79);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 15 Maret 2022
WALI KOTA DEPOK,
TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 15 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,
TTD

SUPIAN SURI
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2022 NOMOR 16

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK


SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

BAB I
SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN

A. KERANGKA REGULASI

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 185 sampai dengan Pasal 188;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lampiran), Bab VII – Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah; dan
3. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

B. DESKRIPSI PROSEDUR

Transaksi pendapatan merupakan pendapatan yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal instansi pemungut pajak terpisah dari bendahara umum daerah (BUD), maka pajak daerah dianggarkan dan dicatat pada instansi tersebut. Sebaliknya apabila pemungutan pajak dilakukan oleh pejabat pengelolaan keuangan daerah (PPKD) selaku BUD, pajak daerah dianggarkan dan dicatat oleh PPKD di SKPKD.

C. PIHAK TERKAIT

Pihak yang terkait dengan proses akuntansi pendapatan adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Akuntansi PPKD
mencatat akuntansi pendapatan-LRA dan pendapatan-LO berdasarkan data yang dihasilkan dari proses pelaksanaan pendapatan

2. PPK SKPD

mencatat akuntansi pendapatan-LRA dan pendapatan-LO berdasarkan data yang dihasilkan dari proses pelaksanaan pendapatan

D. PROSEDUR AKUNTANSI PENDAPATAN

Langkah 1

Pencatatan Transaksi

PPK-SKPD mencatat akuntansi pendapatan-LRA dan pendapatan-LO berdasarkan data yang dihasilkan dari proses pelaksanaan pendapatan. PPK-SKPD juga mencatat aset, hutang, dan ekuitas berdasarkan data yang dihasilkan dari pelaksanaan pendapatan yang mempengaruhi aset, hutang, dan ekuitas terkait.

Dalam Sistem dan Prosedur ini, transaksi terkait pendapatan akan dibagi menjadi sembilan jenis, yaitu:

- a. Penetapan Pendapatan
- b. Penerimaan Pendapatan di Bendahara Penerimaan SKPD
- c. Penerimaan Pendapatan melalui RKUD
- d. Penyetoran Pendapatan
- e. Kelebihan Pendapatan (SKLB) - Koreksi Pendapatan
- f. Kelebihan Pendapatan (SKLB) - Belanja Tidak Terduga
- g. Penerimaan Pendapatan di muka melalui Bendahara Penerimaan
- h. Penerimaan Pendapatan di muka melalui RKUD
- i. Pencatatan dan Pengesahan Dana Kapitasi, Dana Desa Dana BOS, dan Pendapatan BLUD

a. Penetapan Pendapatan

SKPD yang berwenang akan menerbitkan Surat Ketetapan terkait besaran pendapatan Daerah. Data penetapan tersebut meliputi jenis pendapatan dan besarnya akan menjadi sumber dalam mengakui pendapatan daerah.

Terhadap transaksi penetapan tersebut PPK-SKPD atau Fungsi Akuntansi PPKD mengakui pendapatan pajak dengan mencatat “Piutang” (sesuai rincian objek terkait) di debit dan “Pendapatan Daerah-LO (sesuai rincian objek terkait) di kredit.

| Tanggal | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening | Debit | Kredit |
|----------|-----------|---------------|-----------------------|------------|------------|
| 5 Mei 21 | SKP | 1.2.1.01.01 | Piutang | 10.000.000 | |
| | No.... | 7.1.1.01.01 | Pendapatan - LO | | 10.000.000 |

b. Penerimaan Pendapatan di Bendahara Penerimaan SKPD

Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang melakukan pembayaran pajak/retribusi melalui bendahara penerimaan baik secara tunai maupun transfer ke rekening bendahara penerimaan akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP).

TBP dan bukti penerimaan pendapatan lainnya menjadi dasar bagi PPK SKPD untuk mengakui pendapatan dengan mencatat “Kas Bendahara Penerimaan” di debit dan “Piutang...” (sesuai rincian objek terkait) di kredit untuk jenis pendapatan yang didahului dengan penetapan. Sedangkan jika jenis pendapatannya tidak didahului dengan penetapan, maka jurnal yang dibuat oleh PPK SKPD adalah “Kas Bendahara Penerimaan” di debit dan “Pendapatan.... - LO” (sesuai rincian objek terkait) di kredit.

Untuk mencatat transaksi realisasi anggaran, PPK-SKPD menjurnal “Estimasi Perubahan SAL” di debit dan “Pendapatan..... -LRA (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

Dengan Penetapan

| Tanggal | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening | Debit | Kredit |
|-----------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| 23 Mei 21 | TBP No.... | 1.1.1.2.1.01 | Kas di Bendahara Penerimaan | 6.000.000 | |
| | | 1.2.1.01.01 | Piutang | | 6.000.000 |
| | | 3.1.2.5.1.01 | Est Perubahan SAL | 6.000.000 | |
| | | 4.1.1.01.01 | Pendapatan - LRA | | 6.000.000 |

Tanpa Penetapan

| Tanggal | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening | Debit | Kredit |
|-----------|---------------|---------------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 23 Mei 21 | TBP No.... | 1.1.1.2.1.01 | Kas di Bendahara Penerimaan | 6.000.000 | |
| | | 7.1.1.01.01 | Pendapatan - LO | | 6.000.000 |
| | | 3.1.2.5.1.01 | Est Perubahan SAL | 6.000.000 | |
| | | 4.1.1.01.01 | Pendapatan- LRA | | 6.000.000 |

c. Penerimaan Pendapatan di RKUD

Setiap pendapatan yang diterima pemerintah daerah melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) akan terinformasikan melalui Nota Kredit. PPKD selaku BUD memberikan notifikasi kepada Bendahara Penerimaan SKPD dan PPK SKPD terkait penerimaan pendapatan melalui RKUD tersebut. Berdasarkan data tersebut PPK SKPD akan mencatat “RK PPKD” di debit dan “Piutang.....(sesuai rincian objek terkait)” di kredit untuk jenis pendapatan yang didahului dengan proses penetapan. Sedangkan jika jenis pendapatannya tidak didahului dengan penetapan, maka jurnal yang dibuat oleh PPK SKPD adalah “RK PPKD” di debit dan “Pendapatan..... - LO (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

Untuk mencatat transaksi realisasi anggarannya, PPK SKPD mencatat “Estimasi Perubahan SAL” di debit dan “Pendapatan..... LRA (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

Dengan Penetapan

| Tanggal | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening | Debit | Kredit |
|----------|--------------------------|---------------|-----------------------|------------|------------|
| 2 Mei 21 | Nota Kredit No.... | 3.1.3.1.1.01 | RK PPKD | 26.000.000 | |
| | | 1.2.1.01.01 | Piutang | | 26.000.000 |
| | | 3.1.2.5.1.01 | Est Perubahan SAL | 26.000.000 | |
| | | 4.1.1.01.01 | Pendapatan- LRA | | 26.000.000 |

Tanpa Penetapan

| Tanggal | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening | Debit | Kredit |
|----------|-----------|---------------|-----------------------|------------|------------|
| 2 Mei 21 | Nota | 3.1.3.1.1.01 | RK PPKD | 26.000.000 | |
| | Kredit | 7.1.1.01.01 | Pendapatan - LO | | 26.000.000 |
| | No.... | 3.1.2.5.1.01 | Est Perubahan SAL | 26.000.000 | |
| | | 4.1.1.01.01 | Pendapatan- LRA | | 26.000.000 |

Penerimaan pendapatan di RKUD juga dicatat oleh Fungsi Akuntansi PPKD dengan “Kas di Kas Daerah” di debit dan “RK SKPD ____” di kredit.

| Tanggal | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening | Debit | Kredit |
|----------|------------------|---------------|-------------------|------------|------------|
| 2 Mei 21 | Nota | 1.1.1.1.1.01 | Kas di Kas Daerah | 26.000.000 | |
| | Kredit No.... | 1.1.13.1.1.01 | RK SKPD ____ | | 26.000.000 |

d. Penyetoran Pendapatan

Seluruh penerimaan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD wajib disetorkan ke Kas Daerah. Penyetoran ini didokumentasikan dengan Surat Tanda Setoran (STS). Berdasarkan data di STS tersebut, PPK-SKPD mencatat “RK PPKD” di debit dan “Kas di Bendahara Penerimaan” di kredit, sedangkan di SKPKD dicatat “Kas di Kasda” di debit dan “RK SKPD....” di kredit.

| Tanggal | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening | Debit | Kredit |
|----------|-----------|---------------|------------------------|------------|------------|
| 7 Mei 21 | STS | 3.1.3.1.1.01 | RK PPKD | 31.000.000 | |
| | No.... | 1.1.1.2.1.01 | Kas di Bend Penerimaan | | 31.000.000 |

Penyetoran pendapatan ini juga dicatat oleh Fungsi Akuntansi PPKD dengan “Kas di Kas Daerah” di debit dan “RK SKPD ____” di kredit.

| Tanggal | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening | Debit | Kredit |
|----------|-----------|---------------|-------------------|------------|------------|
| 7 Mei 21 | STS | 1.1.1.1.1.01 | Kas di Kas Daerah | 31.000.000 | |
| | No.... | 1.1.13.01.01 | RK SKPD ____ | | 31.000.000 |

e. Kelebihan Pendapatan (SKLB) - Koreksi Pendapatan

Dalam hal terdapat kelebihan penerimaan pajak daerah dan/atau restitusi daerah, Pemerintah Daerah menetapkan Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKLB) sebagai dasar pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan daerah.

Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah diperlakukan sebagai koreksi pendapatan untuk penerimaan daerah yang:

- i. sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun sebelumnya
- ii. sifatnya tidak berulang yang terjadi dalam tahun yang sama

Berdasarkan data dalam SKLB tersebut, PPK SKPD mencatat “Pendapatan ... - LO” (sesuai rincian objek terkait) di debit dan “Utang Kelebihan” (sesuai rincian objek terkait) di kredit.

Ketika SP2D untuk pengembalian telah terbit, PPK SKPD mencatat “Utang Kelebihan” (sesuai rincian objek terkait) di debit dan “RK PPKD” di kredit.

Kemudian PPK SKPD membuat jurnal koreksi atas pendapatan LRA terkait dengan mencatat “Pendapatan ... - LRA” (sesuai rincian objek terkait) di debit dan “Estimasi Perubahan SAL” di kredit.

| Tanggal | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening | Debit | Kredit |
|-----------|-----------|---------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 9 Jun 21 | SKLB | 7.1.1.01.01 | Pendapatan ... - LO | 9.000.000 | |
| | No.... | 2.1.7.1.1.01 | Utang Kelebihan | | 9.000.000 |
| 15 Jun 21 | SP2D | 2.1.7.1.1.01 | Utang Kelebihan | 9.000.000 | |
| | No... | 3.1.3.1.1.01 | RK PPKD | | 9.000.000 |
| 15 Jun 21 | BM No... | 4.1.1.7.01 | Pendapatan ... - LRA | 9.000.000 | |
| | | 3.1.2.5.1.01 | Est Perubahan SAL | | 9.000.000 |

Pada saat SP2D untuk pengembalian terbit, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat “RK SKPD ____” di debit dan “Kas di Kas Daerah” di kredit.

| Tanggal | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening | Debit | Kredit |
|---------|-----------|---------------|-------------------|-----------|-----------|
| 15 Jun | SP2D | 1.1.13.01.01 | RK SKPD ____ | 9.000.000 | |
| 21 | No.... | 1.1.1.1.1.01 | Kas di Kas Daerah | | 9.000.000 |

f. Kelebihan Pendapatan (SKLB) - Belanja Tidak Terduga

Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah diperlakukan sebagai belanja tidak terduga untuk penerimaan daerah yang sifatnya tidak berulang dan terjadi pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan data dalam SKLB, PPK SKPD mencatat “Beban Tidak Terduga” di debit dan “Utang Kelebihan” (sesuai rincian objek terkait) di kredit.

Ketika SP2D untuk pengembalian telah terbit, PPK SKPD mencatat “Utang Kelebihan” (sesuai rincian objek terkait) di debit dan “RK PPKD” di kredit.

Kemudian PPK SKPD mencatat “Belanja Tidak Terduga” di debit dan “Estimasi Perubahan SAL” di kredit.

| Tanggal | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening | Debit | Kredit |
|-----------|-----------|---------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 9 Jun 21 | SKLB | 8.4.1.1.1.01 | Beban Tak Terduga | 9.000.000 | |
| | No.... | 2.1.7.1.1.01 | Utang Kelebihan | | 9.000.000 |
| 15 Jun 21 | SP2D | 2.1.7.1.1.01 | Utang Kelebihan | 9.000.000 | |
| | No... | 3.1.3.1.1.01 | RK PPKD | | 9.000.000 |
| 15 Jun 21 | BM No... | 5.3.1.1.1.01 | Belanja Tidak Terduga | 9.000.000 | |
| | | 3.1.2.5.1.01 | Est Perubahan SAL | | 9.000.000 |

Pada saat SP2D untuk pengembalian terbit, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat “RK SKPD ___” di debit dan “Kas di Kas Daerah” di kredit.

| Tanggal | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening | Debit | Kredit |
|-----------|-----------|---------------|-------------------|-----------|-----------|
| 15 Jun 21 | SP2D | 1.1.13.1.1.01 | RK SKPD _____ | 9.000.000 | |
| | No.... | 1.1.1.1.1.01 | Kas di Kas Daerah | | 9.000.000 |

g. Penerimaan Pendapatan di muka melalui Bendahara Penerimaan

Beberapa jenis pendapatan dimungkinkan untuk diterima di muka oleh pemerintah daerah, baik melalui Bendahara Penerimaan maupun melalui RKUD. Penerimaan di Bendahara Penerimaan akan dicatat oleh PPK SKPD dengan “Kas di Bendahara Penerimaan” di debit dan “Uang Muka” (sesuai rincian obyek terkait) di kredit.

Untuk mencatat transaksi realisasi anggarannya, PPK SKPD mencatat “Estimasi Perubahan SAL” di debit dan “Pendapatan..... LRA (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

Setelah Bendahara Penerimaan menyetorkan ke Kas Daerah, PPK SKPD mencatat data penyetoran di STS tersebut dengan “RK PPKD” di debit dan “Kas di Bendahara Penerimaan” di kredit.

Pada akhir periode, PPK SKPD membuat jurnal koreksi untuk mengakui pendapatan diterima di muka yang menjadi hak pemerintah daerah di periode bersangkutan. Jurnal koreksi yang dibuat adalah “Uang Muka” (sesuai rincian obyek terkait) di debit dan “Pendapatan ... -LO” (sesuai rincian obyek terkait) di kredit.

| Tanggal | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening | Debit | Kredit |
|-----------|---------------|---------------|--------------------------|------------|------------|
| 19 Jun 21 | TBP No.... | 1.1.1.2.1.01 | Kas Bendahara Penerimaan | 50.000.000 | |
| | | 2.1.5.3.1.01 | Uang Muka | | 50.000.000 |
| | | 3.1.2.5.1.01 | Est Perubahan SAL | 50.000.000 | |
| | | 4.1.4.1.2.02 | Pendapatan ... - LRA | | 50.000.000 |
| 20 Jun 21 | STS No... | 3.1.3.1.1.01 | RK PPKD | 50.000.000 | |
| | | 1.1.1.2.1.01 | Kas Bendahara Penerimaan | | 50.000.000 |
| 31 Des 21 | BM No... | 2.1.5.3.1.01 | Uang Muka | 20.000.000 | |
| | | 7.1.1.01.01 | Pendapatan ... - LO | | 20.000.000 |

Pada saat penyetoran ke Kas Daerah, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat “Kas di Kas Daerah” di debit dan “RK SKPD ___” di kredit.

| Tanggal | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening | Debit | Kredit |
|-----------|-----------|---------------|-------------------|------------|------------|
| 20 Jun 21 | STS | 1.1.1.1.1.01 | Kas di Kas Daerah | 50.000.000 | |
| | No.... | 1.1.13.1.1.01 | RK SKPD _____ | | 50.000.000 |

h. Penerimaan Pendapatan di muka melalui RKUD

Pendapatan diterima di muka yang melalui RKUD akan dicatat oleh PPK SKPD dengan “RK PPKD” di debit dan “Uang Muka” (sesuai rincian obyek terkait) di kredit.

Untuk mencatat transaksi realisasi anggarannya, PPK SKPD mencatat “Estimasi Perubahan SAL” di debit dan “Pendapatan..... LRA (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

Pada akhir periode, PPK SKPD membuat jurnal koreksi untuk mengakui pendapatan diterima di muka yang menjadi hak pemerintah daerah di periode bersangkutan. Jurnal koreksi yang dibuat adalah “Uang Muka” (sesuai rincian obyek terkait) di debit dan “Pendapatan ... -LO” (sesuai rincian obyek terkait) di kredit.

| Tanggal | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening | Debit | Kredit |
|-----------|---------------|---------------|-----------------------------|------------|------------|
| 19 Jun 21 | TBP No.... | 1.1.1.2.1.01 | Kas Bendahara Penerimaan | 50.000.000 | |
| | | 2.1.5.3.1.01 | Uang Muka | | 50.000.000 |
| | | 3.1.2.5.1.01 | Est Perubahan SAL | 50.000.000 | |
| | | 4.1.4.1.2.02 | Pendapatan ... - LRA | | 50.000.000 |
| 31 Des 21 | BM No... | 2.1.5.3.1.01 | Uang Muka | 20.000.000 | |
| | | 7.1.1.01.01 | Pendapatan ... - LO | | 20.000.000 |

Pada saat penerimaan pendapatan di muka melalui Kas Daerah, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat “Kas di Kas Daerah” di debit dan “RK SKPD ___” di kredit.

| Tanggal | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening | Debit | Kredit |
|-----------|-----------|---------------|-------------------|------------|------------|
| 20 Jun 22 | STS | 1.1.1.1.1.01 | Kas di Kas Daerah | 50.000.000 | |
| | No.... | 1.1.13.1.1.01 | RK SKPD _____ | | 50.000.000 |

i. Pencatatan dan Pengesahan Dana Kapitasi, Dana Desa Dana BOS, dan Pendapatan BLUD

Dalam hal penganggaran pendapatan daerah yang memiliki karakteristik khusus antara lain Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Desa, Dana Kapitasi, bantuan pemerintah dari Kementerian/Lembaga dan pendapatan lainnya, yang penerimaan pendapatannya tidak melalui RKUD, penerimaan pendapatannya dilakukan berdasarkan notifikasi atau pengesahan pendapatan atau mekanisme lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengesahan pendapatan yang dilakukan BUD akan dicatat oleh PPKD dengan “Kas” (sesuai rincian obyek terkait) di debit dan “Pendapatan – LO” (sesuai rincian obyek terkait) di kredit.

Untuk mencatat transaksi realisasi anggarannya, PPKD mencatat “Estimasi Perubahan SAL” di debit dan “Pendapatan..... LRA (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

| Tanggal | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening | Debit | Kredit |
|----------|---------------------------|---------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| 1 Mar 21 | Dokumen sumber. .. No.... | 1.1.1.6.1.01 | Kas Dana Kapitasi pd FKTP | 30.000.00 0 | |
| | | 2.1.5.3.1.01 | Pendapatan Dana Kapitasi - LO | | 30.000.00 0 |
| | | 3.1.2.5.1.01 | Est Perubahan SAL | 30.000.00 0 | |
| | | 4.1.4.1.2.02 | Pendapatan Dana Kapitasi LRA | | 30.000.00 0 |

Langkah 2

Klasifikasi Transaksi

- a. PPK-SKPD melakukan klasifikasi atas transaksi yang sebelumnya telah dicatat. Dalam proses ini, PPK-SKPD memindahkan data transaksi ke buku besar berdasarkan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. PPK-SKPD menghitung saldo di setiap buku besar berdasarkan klasifikasi yang dilakukan.
- c. Pencatatan ini dapat dilakukan secara elektronik dan merupakan integrasi dengan proses transaksi di setiap siklus pengelolaan keuangan daerah. Pencatatan ini didokumentasikan dalam buku Jurnal yang juga ditampilkan secara elektronik.

E. DOKUMEN

E.1 Buku Jurnal

| Pemerintah Kota Depok | | | | | |
|------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|--------------|---------------|
| Buku Jurnal | | | | | |
| SKPD : | | | | | |
| Tanggal | Nomor Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening | Debit | Kredit |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

E.2 Buku Besar

Pemerintah Kota Depok
Buku Besar

SKPD :
Kode Rekening :
Nama Rekening :
Pagu APBD*) :

| Tanggal | Uraian | Ref | Debit | Kredit | Saldo |
|---------|--------|-----|-------|--------|-------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

*) : Untuk akun-akun komponen LRA

E.3 Neraca Saldo

Pemerintah Kota Depok
Neraca Saldo
Per tanggal

SKPD :

| No. Urut | Kode Rekening | Nama Rekening | Debit | Kredit |
|-------------|------------------|---------------|-------|--------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

BAB II

SISTEM AKUNTANSI BELANJA DAN BEBAN

A. KERANGKA REGULASI

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 185 sampai dengan Pasal 188;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lampiran), Bab VII – Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah; dan
3. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

B. DESKRIPSI PROSEDUR

Akuntansi belanja dan beban merupakan proses mengidentifikasi dan mencatat setiap transaksi belanja. Akuntansi belanja digunakan untuk tujuan pembuatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Sedangkan akuntansi beban digunakan untuk tujuan pembuatan Laporan Operasional (LO).

Belanja diakui pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dan diukur berdasarkan besaran kas yang dikeluarkan. Sedangkan beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi. Beban diukur senilai besaran terjadinya konsumsi suatu aset (barang/jasa), atau besaran timbulnya kewajiban, atau taksiran yang handal atas penurunan manfaat ekonomi dari suatu aset atau potensi jasa.

C. PIHAK TERKAIT

Pihak yang terkait dengan proses akuntansi belanja dan beban adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Akuntansi PPKD
 - a. mencatat akuntansi belanja dan beban berdasarkan data yang dihasilkan dari proses pelaksanaan belanja.

2. PPK SKPD

- a. mencatat akuntansi belanja dan beban berdasarkan data yang dihasilkan dari proses pelaksanaan belanja.

D. PROSEDUR AKUNTANSI BELANJA DAN BEBAN

Langkah 1

Pencatatan Transaksi

PPK-SKPD dan PPKD/Fungsi Akuntansi PPKD mencatat akuntansi belanja dan beban berdasarkan data yang dihasilkan dari proses pelaksanaan belanja. PPK-SKPD dan PPKD/Fungsi Akuntansi PPKD juga mencatat aset, hutang, dan ekuitas berdasarkan data yang dihasilkan dari pelaksanaan belanja yang mempengaruhi aset, hutang, dan ekuitas terkait.

Dalam Sistem dan Prosedur ini, transaksi terkait belanja akan dibagi menjadi dua kelompok dan sembilan jenis, yaitu:

- a. Belanja UP/GU/TU
 1. Belanja dengan Panjar
 2. Belanja tanpa Panjar
 3. Penerbitan SP2D UP/GU/TU
 4. Pengembalian sisa uang UP/GU/TU
- b. Belanja LS
 1. Verifikasi Belanja LS oleh Bendahara
 2. Penerbitan SP2D LS Gaji & Tunjangan
 3. Penerbitan SP2D LS Barang & Jasa tanpa Aset Tetap
 4. Penerbitan SP2D LS Barang & Jasa dengan Aset Tetap
 5. Penerbitan SP2D LS Pihak Ketiga Lainnya

a. Belanja UP/GU/TU

a. 1. Belanja dengan Panjar

Berdasarkan bukti transaksi belanja menggunakan uang panjar yang telah diverifikasi oleh Bendahara Pengeluaran, PPK SKPD/PPKD mencatat “Beban/Aset (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Kas Bendahara Pengeluaran” di kredit, sebagai transaksi realisasi belanja, PPK-SKPD/PPKD mencatat “Belanja.....(sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Estimasi Perubahan SAL” di kredit.

| Tanggal | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening | Debit | Kredit |
|----------|-----------|---------------|-------------------------|-----------|-----------|
| 2 Apr 21 | Bukti | 8._._._._ | Beban / Aset ... | 3.000.000 | |
| | belanja | 1.1.1.3.1.01 | Kas di Bend Pengeluaran | | 3.000.000 |
| | No.... | 5._._._._ | Belanja | 3.000.000 | |
| | | 3.1.2.5.1.01 | Estimasi Perubahan SAL | | 3.000.000 |

a. 2. Belanja tanpa Panjar

Untuk transaksi belanja yang tidak menggunakan uang panjar pencatatan terbagi atas 2 (dua) tahap, yaitu pada saat:

1) Verifikasi bukti transaksi belanja (*invoice*)

Berdasarkan bukti transaksi belanja yang telah diverifikasi oleh Bendahara Pengeluaran PPK SKPD/PPKD mencatat “Beban../Aset ... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Utang Belanja. .(sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

| Tanggal | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening | Debit | Kredit |
|----------|-----------|---------------|----------------------|-----------|-----------|
| 5 Apr 21 | Bukti blj | 8._._._._ | Beban/Aset ... | 5.000.000 | |
| | No.... | 2.1._._._._ | Utang Belanja | | 5.000.000 |
| | Bukti blj | 8._._._._ | Beban/Aset ... | 7.000.000 | |
| | No.... | 2.1._._._._ | Utang Belanja | | 7.000.000 |

2) Pembayaran ke pihak ke-3

Berdasarkan bukti pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran ke pihak ketiga, PPK SKPD/PPKD mencatat “Utang belanja..... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Kas Bendahara Pengeluaran” di kredit. Selain itu, sebagai transaksi realisasi belanja, PPK-SKPD/PPKD mencatat “Belanja..... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Estimasi Perubahan SAL” di kredit dengan jurnal:

| Tanggal | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening | Debit | Kredit |
|----------|--------------------|---------------|-------------------------|-----------|------------|
| 9 Apr 21 | Bukti bayar No.... | 2.1._._._. | Utang Belanja | 5.000.000 | |
| | | 2.1._._._. | Utang Belanja | 7.000.000 | |
| | | 1.1.1.3.1.01 | Kas di Bend Pengeluaran | | 12.000.000 |
| | | 5._._._._. | Belanja | 5.000.000 | |
| | | 5._._._._. | Belanja | 7.000.000 | |
| | | 3.1.2.5.1.01 | Est Perubahan SAL | | 12.000.000 |

a. 3. Penerbitan SP2D UP/GU/TU

Berdasarkan SP2D UP/GU/TU yang diterbitkan, PPK SKPD mencatat pengakuan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan dengan “Kas Bendahara Pengeluaran” di debit dan “RK PPKD” di kredit.

| Tanggal | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening | Debit | Kredit |
|----------|-------------|---------------|-------------------------|------------|------------|
| 3 Feb 21 | SP2D No.... | 1.1.1.3.1.01 | Kas di Bend Pengeluaran | 87.000.000 | |
| | | 3.1.3.1.1.01 | RK PPKD | | 87.000.000 |

Sedangkan Fungsi Akuntansi PPKD mencatat “RK SKPD.....” di debit dan “Kas di Kasda” di kredit.

| Tanggal | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening | Debit | Kredit |
|----------|-------------|---------------|-------------------|------------|------------|
| 3 Feb 21 | SP2D No.... | 1.1.13.1.1.01 | RK SKPD _____ | 87.000.000 | |
| | | 1.1.1.1.1.01 | Kas di Kas Daerah | | 87.000.000 |

a. 4. Pengembalian sisa dana UP/GU/TU

Berdasarkan bukti penyetoran sisa UP/GU/TU ke Kas Daerah yang dilakukan Bendahara Pengeluaran SKPD, PPK SKPD mencatat “RK PPKD” di debit dan “Kas Bendahara Pengeluaran” di kredit.

| Tanggal | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening | Debit | Kredit |
|---------|-----------|---------------|-------------------------|-----------|-----------|
| 27 Des | STS | 3.1.3.1.1.01 | RK PPKD | 2.000.000 | |
| 21 | No.... | 1.1.1.3.1.01 | Kas di Bend Pengeluaran | | 2.000.000 |

Sedangkan Fungsi Akuntansi PPKD mencatat “Kas di Kasda” di debit dan “RK SKPD.....” di kredit.

| Tanggal | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening | Debit | Kredit |
|---------|-----------|---------------|-------------------|-----------|-----------|
| 27 Des | STS | 1.1.1.1.1.01 | Kas di Kas Daerah | 2.000.000 | |
| 21 | No.... | 1.1.13.1.1.01 | RK SKPD _____ | | 2.000.000 |

b. Belanja LS

b. 1. Verifikasi Belanja LS oleh Bendahara

Berdasarkan verifikasi yang dilakukan Bendahara Pengeluaran atas dokumen pengajuan LS, PPK SKPD mengidentifikasi dan mencatat:

- 1) Belanja LS yang tidak menghasilkan aset dicatat “Beban..... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Utang Belanja.....(sesuai rincian objek terkait)” di kredit
- 2) Belanja LS yang menghasilkan aset dicatat “Aset..... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Utang Belanja..... (sesuai rincian objek terkait)” di kredit

Belanja LS yang tidak menghasilkan Aset

| Tanggal | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening | Debit | Kredit |
|----------|-----------|---------------|---------------------|------------|------------|
| 7 Jun 21 | Bukti ... | 8._._._._ | Beban | 92.000.000 | |
| | No.... | 2.1._._._ | Utang Belanja | | 92.000.000 |

Belanja LS yang menghasilkan Aset

| Tanggal | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening | Debit | Kredit |
|----------|-----------|---------------|---------------------|------------|------------|
| 2 Jul 21 | Bukti ... | 1._._._._ | Aset | 88.000.000 | |
| | No.... | 2.1._._._ | Utang Belanja | | 88.000.000 |

b. 2. Penerbitan SP2D LS Gaji & Tunjangan

Pengakuan belanja dan beban gaji dan tunjangan dilakukan berdasarkan SP2D LS Gaji dan Tunjangan. SP2D LS Gaji dan Tunjangan ini menjadi dasar bagi PPK-SKPD untuk mencatat “Beban Gaji.... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “RK PPKD” di kredit. Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap realisasi belanja gaji dan tunjangan, PPK-SKPD mencatat “Belanja Gaji.... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Estimasi Perubahan SAL” di kredit.

| Tanggal | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening | Debit | Kredit |
|----------|-----------|---------------|-------------------|-------------|-------------|
| 1 Apr 21 | SP2D LS | 8.1.1.1._._ | Beban Gaji ... | 105.000.000 | |
| | GT No... | 3.1.3.1.1.01 | RK PPKD | | 105.000.000 |
| | | 5.1.1.1._._ | Belanja Gaji | 105.000.000 | |
| | | 3.1.2.5.1.01 | Est Perubahan SAL | | 105.000.000 |

Atas penerbitan SP2D LS Gaji dan Tunjangan ini, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat “RK SKPD.....” di debit dan “Kas di Kasda” di kredit.

| Tanggal | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening | Debit | Kredit |
|----------|-----------|---------------|-------------------|-------------|-------------|
| 1 Apr 21 | SP2D LS | 1.1.13.1.1.01 | RK SKPD _____ | 105.000.000 | |
| | GT No... | 1.1.1.1.1.01 | Kas di Kas Daerah | | 105.000.000 |

Belanja gaji dan tunjangan dicatat jumlah brutonya oleh PPK SKPD, dengan nilai sebelum potongan-potongan. Berbagai potongan atas belanja gaji dan tunjangan tidak dicatat oleh PPK-SKPD, karena akan dicatat oleh Fungsi Akuntansi PPKD.

b. 3. Penerbitan SP2D LS Barang & Jasa tanpa Aset Tetap

Berdasarkan SP2D LS Barang dan Jasa yang diterbitkan untuk belanja yang tidak menghasilkan aset, PPK-SKPD mencatat “Utang Belanja (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “RK PPKD” di kredit. Dan sebagai transaksi realisasi belanja, PPK-SKPD mencatat “Belanja..... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Estimasi Perubahan SAL” di kredit,

| Tanggal | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening | Debit | Kredit |
|----------|---------------------|---------------|-------------------|------------|------------|
| 9 Mei 21 | SP2D LS BJ No... | 2.1.1.1.1.1 | Utang Belanja ... | 75.000.000 | |
| | | 3.1.3.1.1.01 | RK PPKD | | 75.000.000 |
| | | 5.1.1.1.1.1 | Belanja | 75.000.000 | |
| | | 3.1.2.5.1.01 | Est Perubahan SAL | | 75.000.000 |

Atas penerbitan SP2D LS Barang dan Jasa ini, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat “RK SKPD.....” di debit dan “Kas di Kasda” di kredit.

| Tanggal | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening | Debit | Kredit |
|----------|---------------------|---------------|-------------------|------------|------------|
| 9 Mei 21 | SP2D LS BJ No... | 1.1.13.1.1.01 | RK SKPD _____ | 75.000.000 | |
| | | 1.1.1.1.1.01 | Kas di Kas Daerah | | 75.000.000 |

Belanja barang tersebut dicatat berdasarkan nilai brutonya.

b. 4. Penerbitan SP2D LS Barang & Jasa dengan Aset Tetap

Berdasarkan SP2D LS Barang dan Jasa yang diterbitkan untuk belanja yang menghasilkan aset, PPK-SKPD mencatat “Utang Belanja Modal.... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “RK PPKD” di kredit. Dan sebagai transaksi realisasi belanja, PPK-SKPD mencatat “Belanja Modal..... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Estimasi Perubahan SAL” di kredit,

| Tanggal | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening | Debit | Kredit |
|-----------|---------------------|---------------|-------------------------|-------------|-------------|
| 12 Mei 21 | SP2D LS BJ No... | 2.1.6.1.1.1 | Utang Belanja Modal ... | 115.000.000 | |
| | | 3.1.3.1.1.01 | RK PPKD | | 115.000.000 |
| | | 5.2.1.1.1.1 | Belanja Modal | 115.000.000 | |
| | | 3.1.2.5.1.01 | Est Perubahan SAL | | 115.000.000 |

Atas penerbitan SP2D LS Barang dan Jasa ini, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat “RK SKPD.....” di debit dan “Kas di Kasda” di kredit.

| Tanggal | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening | Debit | Kredit |
|-----------|-----------|---------------|-------------------|-------------|-------------|
| 12 Mei 21 | SP2D LS | 1.1.13.1.1.01 | RK SKPD _____ | 115.000.000 | |
| | BJ No... | 1.1.1.1.1.01 | Kas di Kas Daerah | | 115.000.000 |

b. 5. Penerbitan SP2D LS Pihak Ketiga Lainnya

SP2D LS Pihak Ketiga Lainnya diterbitkan untuk pembayaran, antara lain:

- 1) hibah berupa uang;
- 2) bantuan sosial berupa uang;
- 3) bantuan keuangan;
- 4) subsidi;
- 5) bagi hasil;
- 6) belanja tidak terduga untuk pengembalian kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya;
- 7) pembayaran kewajiban Pemerintah Daerah atas putusan pengadilan, dan rekomendasi APIP dan/atau rekomendasi BPK.

Berdasarkan SP2D LS Pihak Ketiga Lainnya, PPK-SKPD mencatat “Beban.... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “RK PPKD” di kredit, Dan sebagai transaksi realisasi belanja, PPK-SKPD mencatat “Belanja..... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Estimasi Perubahan SAL” di kredit.

| Tanggal | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening | Debit | Kredit |
|----------|-----------|---------------|-------------------|-------------|-------------|
| 6 Jul 21 | SP2D LS | 8. | Beban | 123.000.000 | |
| | PKL | 3.1.3.1.1.01 | RK PPKD | | 123.000.000 |
| | No... | 5. | Belanja | 123.000.000 | |
| | | 3.1.2.5.1.01 | Est Perubahan SAL | | 123.000.000 |

Atas penerbitan SP2D LS Pihak Ketiga Lainnya ini, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat “RK SKPD.....” di debit dan “Kas di Kasda” di kredit.

| Tanggal | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening | Debit | Kredit |
|----------|-----------|---------------|-------------------|-------------|-------------|
| 6 Jul 21 | SP2D LS | 1.1.13.1.1.01 | RK SKPD _____ | 123.000.000 | |
| | PKL No... | 1.1.1.1.1.01 | Kas di Kas Daerah | | 123.000.000 |

Langkah 2

Klasifikasi Transaksi

- PPK-SKPD melakukan klasifikasi atas transaksi yang sebelumnya telah dicatat. Dalam proses ini, PPK-SKPD memindahkan data transaksi ke buku besar berdasarkan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- PPK-SKPD menghitung saldo di setiap buku besar berdasarkan klasifikasi yang dilakukan.
- Pencatatan ini dapat dilakukan secara elektronik dan merupakan integrasi dengan proses transaksi di setiap siklus pengelolaan keuangan daerah. Pencatatan ini didokumentasikan dalam buku Jurnal yang juga ditampilkan secara elektronik.

E. DOKUMEN

E.1 Buku Jurnal

| Pemerintah Kota Depok | | | | | |
|------------------------------|-------------|---------------|---------------|-------|--------|
| Buku Jurnal | | | | | |
| SKPD : | | | | | |
| Tanggal | Nomor Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening | Debit | Kredit |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

E.2 Buku Besar

Pemerintah Kota Depok
Buku Besar

SKPD :
Kode Rekening :
Nama Rekening :
Pagu APBD^{*)} :

| Tanggal | Uraian | Ref | Debit | Kredit | Saldo |
|---------|--------|-----|-------|--------|-------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

^{*)} : Untuk akun-akun komponen LRA

E.3 Neraca Saldo

Pemerintah Kota Depok
Neraca Saldo
Per tanggal

SKPD :

| No. Urut | Kode Rekening | Nama Rekening | Debit | Kredit |
|----------|---------------|---------------|-------|--------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

BAB III

SISTEM AKUNTANSI PEMBIAYAAN

A. KERANGKA REGULASI

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 185 sampai dengan Pasal 188;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lampiran), Bab VII – Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah; dan
3. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

B. DESKRIPSI PROSEDUR

Akuntansi pembiayaan merupakan proses pencatatan untuk semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya dan dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

C. PIHAK TERKAIT

Pihak yang terkait dengan proses akuntansi pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. PPK SKPKD
 - a. mencatat akuntansi pembiayaan berdasarkan data yang dihasilkan dari proses pelaksanaan pembiayaan

D. PROSEDUR AKUNTANSI PEMBIAYAAN

Langkah 1

Pencatatan Transaksi

PPK-SKPKD mencatat akuntansi pembiayaan berdasarkan data yang dihasilkan dari proses penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. PPK-SKPKD juga mencatat aset, hutang, dan ekuitas berdasarkan data yang dihasilkan dari pelaksanaan pembiayaan yang mempengaruhi aset, hutang, dan ekuitas terkait.

Dalam Sistem dan Prosedur ini, transaksi terkait pembiayaan dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

- a. Penerimaan Pembiayaan
- b. Pencairan Aset Keuangan
- c. Pengeluaran Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan

Akuntansi penerimaan pembiayaan pada dasarnya merupakan akuntansi yang tidak berdiri sendiri. Akuntansi penerimaan pembiayaan ini melekat pada pencatatan transaksi lainnya khususnya penerimaan kas dari transaksi aset nonlancar dan kewajiban jangka panjang. Akuntansi ini akan menjadi sebuah jurnal komplementer yang melengkapi jurnal transaksi pelepasan investasi, transaksi penerimaan utang dan transaksi lainnya yang sejenis.

Penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari:

1. SiLPA;
2. pencairan Dana Cadangan;
3. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
4. penerimaan Pinjaman Daerah;
5. penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
6. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Data realisasi penerimaan pembiayaan akan terinfokan melalui notifikasi perbankan (Nota Kredit). Berdasarkan notifikasi perbankan tersebut, PPK SKPKD mencatat “RK PPKD” di debit dan “Utang..... (sesuai rincian objek terkait)” di kredit. Sebagai transaksi realisasi pembiayaan, PPK SKPKD mencatat “Estimasi Perubahan SAL” di debit dan “Pinjaman dari (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

| Tanggal | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening | Debit | Kredit |
|----------|-----------|---------------|--------------------|-------------|-------------|
| 7 Apr 21 | Nota | 3.1.3.1.1.01 | RK PPKD | 300.000.000 | |
| | Kredit | 2.2._._._._ | Utang | | 300.000.000 |
| | No.... | 3.1.2.5.1.01 | Est Perubahan SAL | 300.000.000 | |
| | | 6.1.4._._._ | Pinjaman dari | | 300.000.000 |

Berdasarkan Nota Kredit ini, Fungsi akuntansi PPKD mencatat “Kas di Kasda” di debit dan “RK SKPKD” di kredit.

| Tanggal | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening | Debit | Kredit |
|----------|------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------|
| 7 Apr 21 | Nota | 1.1.1.1.1.01 | Kas di Kas Daerah | 300.000.000 | |
| | Kredit No.... | 1.1.13.1.1._ | RK SKPKD | | 300.000.000 |

b. Pencairan Aset Keuangan

Beberapa penerimaan pembiayaan merupakan transaksi pencairan aset keuangan, seperti pencairan dana cadangan, penarikan investasi, penerimaan kembali pinjaman daerah, dan pencairan aset keuangan lainnya.

Berdasarkan notifikasi perbankan atas pencairan aset keuangan, PPK SKPKD mencatat “RK PPKD” di debit dan “Aset Keuangan (sesuai rincian objek terkait)” di kredit. Sebagai transaksi realisasi pembiayaan, PPK SKPKD mencatat “Estimasi Perubahan SAL” di debit dan “Penerimaan Pembiayaan.... (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

| Tanggal | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening | Debit | Kredit |
|----------|--------------------|---------------|----------------------------|-------------|-------------|
| 5 Agt 21 | Nota Kredit No.... | 3.1.3.1.1.01 | RK PPKD | 500.000.000 | |
| | | 1.2._._._._ | Investasi Jk Panjang | | 500.000.000 |
| | | 3.1.2.5.1.01 | Est Perubahan SAL | 500.000.000 | |
| | | 6.1.2._._._ | Pencairan | | 500.000.000 |

Berdasarkan Nota Kredit ini, Fungsi akuntansi PPKD mencatat “Kas di Kasda” di debit dan “RK SKPKD” di kredit.

| Tanggal | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening | Debit | Kredit |
|----------|--------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------|
| 5 Agt 21 | Nota Kredit No.... | 1.1.1.1.1.01 | Kas di Kas Daerah | 500.000.000 | |
| | | 1.1.13.1.1._ | RK SKPKD | | 500.000.000 |

c. Pengeluaran Pembiayaan

Sama halnya dengan akuntansi penerimaan pembiayaan, akuntansi pengeluaran pembiayaan juga merupakan akuntansi yang tidak berdiri sendiri. Akuntansi pengeluaran pembiayaan ini melekat pada pencatatan transaksi lainnya khususnya pengeluaran kas atas transaksi aset nonlancar dan kewajiban jangka panjang.

Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk:

1. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
2. penyertaan modal daerah;
3. pembentukan Dana Cadangan;
4. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau

5. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Realisasi pengeluaran pembiayaan dilakukan dengan penerbitan SP2D Pihak Ketiga Lainnya. Berdasarkan SP2D tersebut, PPK SKPKD mencatat “Aset/Kewajiban (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “RK PPKD” di kredit.

Juga dicatat “Pengeluaran Pembiayaan (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Estimasi Perubahan SAL” di kredit.

| Tanggal | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening | Debit | Kredit |
|----------|----------------|---------------|-----------------------------|-------------|-------------|
| 9 Sep 21 | SP2D No.... | 1._._ / 2._._ | Aset.../Kewajiban.... | 700.000.000 | |
| | | 3.1.3.1.1.01 | RK PPKD | | 700.000.000 |
| | | 6.2._._._._ | Pengeluaran Pembiayaan.. | 700.000.000 | |
| | | 3.1.2.5.1.01 | Est Perubahan SAL | | 700.000.000 |

Berdasarkan Nota Kredit ini, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat “Kas di Kasda” di debit dan “RK SKPKD” di kredit.

| Tanggal | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening | Debit | Kredit |
|----------|--------------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------|
| 5 Agt 21 | Nota Kredit No.... | 1.1.13.1.1._ | RK SKPKD | 700.000.000 | |
| | | 1.1.1.1.1.01 | Kas di Kas Daerah | | 700.000.000 |

Langkah 2

Klasifikasi Transaksi

- PPK-SKPD melakukan klasifikasi atas transaksi yang sebelumnya telah dicatat. Dalam proses ini, PPK-SKPD memindahkan data transaksi ke buku besar berdasarkan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- PPK-SKPD menghitung saldo di setiap buku besar berdasarkan klasifikasi yang dilakukan.

- c. Pencatatan ini dapat dilakukan secara elektronik dan merupakan integrasi dengan proses transaksi di setiap siklus pengelolaan keuangan daerah. Pencatatan ini didokumentasikan dalam buku Jurnal yang juga ditampilkan secara elektronik.

E. DOKUMEN

E.1 Buku Jurnal

| Pemerintah Kota Depok | | | | | |
|------------------------------|-------------|---------------|---------------|-------|--------|
| Buku Jurnal | | | | | |
| SKPD : | | | | | |
| Tanggal | Nomor Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening | Debit | Kredit |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

E.2 Buku Besar

| Pemerintah Kota Depok | | | | | | |
|-------------------------------|--------|-----|-------|--------|-------|--|
| Buku Besar | | | | | | |
| SKPD | : | | | | | |
| Kode Rekening | : | | | | | |
| Nama Rekening | : | | | | | |
| Pagu APBD^{*)} | : | | | | | |
| Tanggal | Uraian | Ref | Debit | Kredit | Saldo | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

^{*)} : Untuk akun-akun komponen LRA

E.3 Neraca Saldo

Pemerintah Kota Depok

Neraca Saldo

Per tanggal

SKPD

:

| No. Urut | Kode Rekening | Nama Rekening | Debit | Kredit |
|-------------|------------------|---------------|-------|--------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

BAB IV

SISTEM AKUNTANSI NON ANGGARAN

A. KERANGKA REGULASI

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 185 sampai dengan Pasal 188;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lampiran), Bab VII – Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah; dan
3. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

B. DESKRIPSI PROSEDUR

Akuntansi non anggaran merupakan pencatatan atau pengakuan atas transaksi yang tidak dianggarkan dalam APBD maupun tidak mempengaruhi realisasi APBD.

C. PIHAK TERKAIT

Pihak yang terkait dengan proses akuntansi non anggaran adalah sebagai berikut:

1. PPK SKPD
 - a. mencatat akuntansi non anggaran di entitas akuntansinya

D. PROSEDUR AKUNTANSI NON ANGGARAN

Langkah 1

Pencatatan Transaksi

PPK-SKPD mencatat akuntansi non anggaran dari transaksi yang terjadi yang mempengaruhi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LO, maupun beban, namun transaksi tersebut tidak dianggarkan dalam APBD atau tidak mempengaruhi realisasi APBD.

Dalam Sistem dan Prosedur ini, transaksi non anggaran dibagi menjadi dua kelompok dan empatbelas jenis, yaitu:

1. Transaksi Non Anggaran di SKPD
 - a. Pendapatan Non Kas (Hibah Barang)
 - b. Hibah/Penyerahan Barang ke Masyarakat
 - c. Penghentian Penggunaan Aset Tetap di SKPD
 - d. Perolehan Aset Tetap
 - e. Penyesuaian Beban Dibayar di muka
 - f. Penyesuaian Pendapatan Diterima di muka
 - g. Hasil Stock Opname
 - h. Uang Muka/Jaminan yang Tidak Dikembalikan
2. Transaksi Non Anggaran di SKPKD
 - a. Pelepasan Aset Tetap
 - b. Pembentukan Investasi Jangka Panjang yang Bersumber dari Aset Tetap
 - c. Hasil Investasi Jangka Panjang
 - d. Penghapusan Piutang
 - e. Pembentukan Investasi Jangka Pendek
 - f. Pencairan Investasi Jangka Pendek

1. Transaksi Non Anggaran di SKPD

1.a. Pendapatan Non Kas (Hibah Barang)

Berdasarkan bukti/dokumen penerimaan hibah berupa aset, PPK SKPD melakukan pencatatan hal-hal terkait penerimaan hibah tersebut dan membuat jurnal “Aset Tetap... /Persediaan (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Pendapatan Hibah- ... LO (sesuai rincian objek terkait)” di kredit. Aset atau barang yang diterima dinilai dengan nilai wajar pada saat perolehan.

| Tanggal | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening | Debit | Kredit |
|----------|--------------------------|---------------|------------------------------------|------------|------------|
| 3 Apr 21 | Dok sumber ... No.... | 1. | Aset Tetap... / Persediaan..... | 35.000.000 | |
| | | 7.3.1. | Pendapatan Hibah ... - LO | | 35.000.000 |

1.b. Hibah/Penyerahan Barang ke Masyarakat

Jenis barang yang bisa dihibahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga di level SKPD adalah barang persediaan di luar aset tetap. Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), PPK SKPD melakukan pencatatan hal-hal terkait hibah/penyerahan barang tersebut dan membuat jurnal “Beban Hibah (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Persediaan (sesuai rincian objek terkait)” di kredit. Aset atau barang yang diterima dinilai dengan nilai wajar pada saat perolehan.

| Tanggal | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening | Debit | Kredit |
|----------|--------------------------|---------------|-----------------|------------|------------|
| 3 Apr 21 | Dok sumber ... No.... | 8.1.5._._._ | Beban Hibah... | 67.000.000 | |
| | | 1.1.12._._._ | Persediaan..... | | 67.000.000 |

1.c. Penghentian Penggunaan Aset Tetap di SKPD

Aset Tetap yang secara permanen dihentikan harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi Aset Tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Berdasarkan SK Penghapusan BMD, PPK SKPD melakukan pencatatan hal-hal terkait penghentian penggunaan aset tetap di SKPD dan membuat jurnal “Aset Lainnya.... (sesuai rincian objek terkait)” di debit, “Akumulasi Penyusutan Aset Tetap ... (sesuai rincian objek terkait)” di debit, dan “Aset Tetap (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

| Tanggal | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening | Debit | Kredit |
|----------|--------------------------|---------------|---------------------------|-------------|-------------|
| 9 Mei 21 | SK Penghapusan No.... | 1.5.4._._._ | Aset Lainnya... | 12.000.000 | |
| | | 1.3.7._._._ | Akumulasi Penyusutan..... | 154.000.000 | |
| | | 1.3._._._._ | Aset Tetap | | 166.000.000 |

Selain di-reclass menjadi aset lainnya, aset yang dihentikan penggunaannya kemudian diserahkan ke SKPKD untuk proses pelepasan selanjutnya. Penyerahan ini dicatat oleh PPK SKPD dengan “RK PPKD” di debit dan “Aset Lainnya (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

| Tanggal | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening | Debit | Kredit |
|----------|-----------------------------|---------------|-----------------|------------|------------|
| 9 Mei 21 | SK Penghapusan No.... | 3.1.3.1.1.01 | RK PPKD | 12.000.000 | |
| | | 1.5.4._._._ | Aset Lainnya... | | 12.000.000 |

Penyerahan ini juga dicatat oleh Fungsi Akuntansi PPKD dengan “Aset Lainnya (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “RK SKPD ” di kredit.

| Tanggal | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening | Debit | Kredit |
|----------|-----------------------------|---------------|-----------------|------------|------------|
| 9 Mei 21 | SK Penghapusan No.... | 1.5.4._._._ | Aset Lainnya... | 12.000.000 | |
| | | 1.1.13.1.1.01 | RK SKPD _____ | | 12.000.000 |

1.d. Perolehan Aset Tetap

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST), PPK SKPD mencatat penambahan aset tetap dengan “Aset Tetap (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Hutang Belanja Modal (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

| Tanggal | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening | Debit | Kredit |
|----------|----------------|---------------|----------------------------|-------------|-------------|
| 7 Jul 21 | BAST No.... | 1.3._._._._ | Aset Tetap | 212.000.000 | |
| | | 2.1.6._._._ | Hutang Belanja Modal... | | 212.000.000 |

1.e. Penyesuaian Beban Dibayar di muka

Biaya-biaya yang belum merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk membayarnya pada periode yang bersangkutan, namun sudah dibayarkan terlebih dahulu dan barang/jasa atas pengeluaran tersebut tidak langsung diterima saat itu juga dapat dicatat dengan dua alternatif pendekatan, yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban.

i. Pendekatan Aset

Dengan pendekatan aset, PPK SKPD mencatat “Beban dibayar di muka” di debit dan “Kas di Bend Pengeluaran/RK PPKD” di kredit pada saat pembayaran.

Jurnal penyesuaian yang dibutuhkan di akhir periode adalah untuk mengakui besarnya aset berupa “beban dibayar di muka” yang sudah menjadi beban pada periode berjalan. PPK SKPD mencatat “Beban (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Beban dibayar di muka... (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

| Tanggal | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening | Debit | Kredit |
|---------|-----------|---------------|-----------------------|------------|------------|
| 31 Des | Memo | 8.1.2._._._ | Beban | 75.000.000 | |
| 21 | No.... | 1.1.11._._._ | Beban dibayar di muka | | 75.000.000 |

ii. Pendekatan Beban

Dengan pendekatan beban, PPK SKPD mencatat “Beban....” di debit dan “Kas di Bend Pengeluaran/RK PPKD” di kredit pada saat pembayaran.

Jurnal penyesuaian yang dibutuhkan di akhir periode adalah untuk mengakui besarnya aset berupa “beban dibayar di muka” dari pembayaran yang telah dilakukan pada periode berjalan. PPK SKPD mencatat “Beban dibayar di muka (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Beban ... (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

| Tanggal | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening | Debit | Kredit |
|---------|-----------|---------------|-----------------------|-------------|-------------|
| 31 Des | Memo | 1.1.11._._._ | Beban dibayar di muka | 125.000.000 | |
| 21 | No.... | 8.1.2._._._ | Beban | | 125.000.000 |

1.f. Penyesuaian Pendapatan Diterima di muka

Pendapatan diterima di muka adalah pendapatan yang diterima oleh SKPD/ Pemerintah Daerah dan sudah disetor ke Rekening Kas Umum Daerah, namun wajib setor belum menikmati barang/jasa/fasilitas dari SKPD/Pemerintah Daerah. Atas penerimaan ini dapat dicatat dengan dua alternatif pendekatan, yaitu pendekatan hutang dan pendekatan pendapatan.

i. Pendekatan Hutang

Dengan pendekatan hutang, PPK SKPD mencatat “Kas di Bend Penerimaan/RK PPKD” di debit dan “Pendapatan diterima di muka” di kredit pada saat penerimaan.

Jurnal penyesuaian yang dibutuhkan di akhir periode adalah untuk mengakui besarnya hutang berupa “pendapatan diterima di muka” yang sudah menjadi pendapatan pada periode berjalan. PPK SKPD mencatat “Pendapatan di muka... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Pendapatan (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

| Tanggal | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening | Debit | Kredit |
|-----------|-----------|---------------|---------------------|------------|------------|
| 31 Des 21 | Memo | 2.1.5._._._ | Pendapatan diterima | 95.000.000 | |
| | No.... | | dimuka .. | | |
| | | 7._._._._ | Pendapatan | | 95.000.000 |

ii. Pendekatan Pendapatan

Dengan pendekatan pendapatan, PPK SKPD mencatat “Kas di Bend Penerimaan/RK PPKD” di debit dan “Pendapatan....” di kredit pada saat penerimaan.

Jurnal penyesuaian yang dibutuhkan di akhir periode adalah untuk mengakui besarnya hutang berupa “Pendapatan diterima di muka” periode berjalan. PPK SKPD mencatat “Pendapatan (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Pendapatan diterima di muka... (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

| Tanggal | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening | Debit | Kredit |
|-----------|----------------|---------------|--------------------------------|-------------|-------------|
| 31 Des 21 | Memo No.... | 7.____.____ | Pendapatan | 100.000.000 | |
| | | 2.1.5.____ | Pendapatan diterima di muka .. | | 100.000.000 |

1.g. Hasil Stock Opname

Berdasarkan Berita Acara Hasil Stock Opname atau dokumen lainnya, PPK SKPD mencatat adanya persediaan yang tersisa, yang pada saat perolehannya dicatat sebagai beban. PPK SKPD mencatat “Persediaan.... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Beban (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

| Tanggal | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening | Debit | Kredit |
|----------|----------------|---------------|------------------|------------|------------|
| 7 Jul 21 | BAST No.... | 1.1.12.____ | Persediaan..... | 41.000.000 | |
| | | 8.1.2.1.____ | Beban Barang ... | | 41.000.000 |

1.h. Uang Muka/Jaminan yang Tidak Dikembalikan

Berdasarkan dokumen sumber yang menyatakan bahwa uang muka/jaminan dari pihak ketiga tidak dikembalikan, PPK SKPD mengakui adanya pendapatan sekaligus pengurangan hutang dengan mencatat “Uang Muka/Jaminan.... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Pendapatan- LO (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

| Tanggal | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening | Debit | Kredit |
|----------|----------------|---------------|---------------------------|------------|------------|
| 7 Jul 21 | BAST No.... | 2.1.5._._._ | Uang Muka/Jaminan..... | 50.000.000 | |
| | | 7.1.4._._._ | Pendapatan... - LO | | 50.000.000 |

2. Transaksi Non Anggaran di SKPKD

2.a. Pelepasan Aset Tetap

Pelepasan Aset Tetap dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti pemusnahan, penjualan, pertukaran, penyerahan ke masyarakat. Aset Tetap yang dilepas atau dihentikan penggunaannya terlebih dahulu di-*reclass* menjadi Aset Lainnya seperti telah dijelaskan dalam prosedur Penghentian Penggunaan Aset Tetap di SKPD.

Berdasarkan SK Penghapusan dan Pelepasan BMD, PPK SKPKD melakukan pencatatan sesuai dengan prosedur pelepasan yang dilaksanakan.

Pemusnahan

PPK SKPKD menjurnal “Defisit Pelepasan Aset Tetap” di debit dan “Aset Lainnya ... (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

| Tanggal | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening | Debit | Kredit |
|-----------|-----------|---------------|---------------------------------|------------|------------|
| 11 Nov 21 | SK No.... | 8.5.1._._._ | Defisit Pelepasan Aset Tetap | 12.000.000 | |
| | | 1.5.4._._._ | Aset Lainnya... | | 12.000.000 |

Penjualan

PPK SKPKD menjurnal “Piutang Pendapatan ... (sesuai rincian objek terkait)” di debit, “Aset Lainnya ... (sesuai rincian objek terkait)” di kredit, dan Surplus/Defisit.... (sesuai rincian objek terkait)” di kredit/debit jika ada.

| Tanggal | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening | Debit | Kredit |
|-----------|-----------|---------------|-------------------------|------------|------------|
| 11 Nov 21 | SK No.... | 1.1.6._._._ | Piutang Penjualan | 20.000.000 | |
| | | 1.5.4._._._ | Aset Lainnya... | | 12.000.000 |
| | | 7.4.1._._._ | Surplus Penjualan ... | | 8.000.000 |

Pertukaran

PPK SKPKD menjurnal “Aset Tetap ... (sesuai rincian objek terkait aset tetap yang diterima)” di debit, “Aset Lainnya ... (sesuai rincian objek terkait)” di kredit, dan Surplus/Defisit.... (sesuai rincian objek terkait)” di kredit/debit jika ada.

| Tanggal | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening | Debit | Kredit |
|-----------|-----------|---------------|------------------------------|------------|------------|
| 11 Nov 21 | SK No.... | 1.3._._._ | Aset Tetap..... | 25.000.000 | |
| | | 1.5.4._._._ | Aset Lainnya... | | 12.000.000 |
| | | 7.4.1._._._ | Surplus Tukar menukar ... | | 13.000.000 |

Penyerahan ke Masyarakat

PPK SKPKD menjurnal “Beban Hibah (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Aset Lainnya ... (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

| Tanggal | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening | Debit | Kredit |
|-----------|-----------|---------------|-----------------|------------|------------|
| 11 Nov 21 | SK No.... | 8.1.5._._._ | Beban Hibah... | 12.000.000 | |
| | | 1.5.4._._._ | Aset Lainnya... | | 12.000.000 |

2.b. Pembentukan Investasi Jangka Panjang yang Bersumber dari Aset Tetap

Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal dengan menginvestasikan aset tetap. Sebelum diinvestasikan, Aset Tetap dimaksud terlebih dahulu di-*reclass* ke akun Aset Lainnya.

Berdasarkan dokumen sumber pembentukan investasi, PPK SKPKD melakukan pencatatan dengan jurnal “Investasi Jangka Panjang... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Aset Lainnya ... (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

| Tanggal | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening | Debit | Kredit |
|----------|-----------|---------------|-----------------------------|-------------|-------------|
| 9 Mei 21 | SK No.... | 1.2._._._ | Investasi Jk Panjang ... | 320.000.000 | |
| | | 1.5.4._._ | Aset Lainnya..... | | 320.000.000 |
| | | - | | | |

2.c. Hasil Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang yang dilakukan pemerintah daerah dapat dilakukan penilaian dengan tiga metode, yaitu metode biaya, metode ekuitas, dan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Pencatatan yang masuk dalam kategori akuntansi non anggaran meliputi pencatatan hasil investasi yang menggunakan metode biaya dan metode ekuitas **pada saat pengumuman** hasil investasi/pengumuman laba badan usaha *investee*.

i. Metode Biaya

Pada saat badan usaha *investee* mengumumkan laba di tahun berkenaan, hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang akan diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha yang terkait.

PPK SKPKD melakukan pencatatan dengan jurnal “Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan – LO (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

| Tanggal | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening | Debit | Kredit |
|----------|---------------------|---------------|--|-------------|-------------|
| 7 Agt 21 | Bukti ... No.... | 1.1.5._._._ | Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan | 310.000.000 | |
| | | 7.1.3._._._ | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO..... | | 310.000.000 |

ii. Metode Ekuitas

Dalam metode ekuitas, keuntungan yang diperoleh badan usaha *investee* akan mempengaruhi jumlah investasi yang dimiliki pemerintah daerah. PPK SKPKD akan menjurnal keuntungan dengan mencatat “Investasi ... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan– LO (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

| Tanggal | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening | Debit | Kredit |
|----------|---------------------|---------------|--|-------------|-------------|
| 7 Agt 21 | Bukti ... No.... | 1.2._._._._ | Investasi Jangka Panjang | 820.000.000 | |
| | | 7.1.3._._._ | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO..... | | 820.000.000 |

2.d. Penghapusan Piutang

Dalam metode penyisihan (*Allowance method*), setiap akhir tahun berdasarkan Buku Besar Piutang dan/atau laporan golongan umur piutang pemerintah daerah akhir periode, PPK SKPKD akan membuat cadangan piutang tak tertagih. PPK SKPKD akan mencatat jurnal “Beban Penyisihan Piutang... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Penyisihan Piutang... (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

| Tanggal | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening | Debit | Kredit |
|-----------|---------------------|---------------|--------------------------------|------------|------------|
| 31 Des 21 | Bukti ... No.... | 8._._._._._ | Beban Penyisihan Piutang... | 60.000.000 | |
| | | 1.1.10._._ | Penyisihan Piutang... | | 60.000.000 |
| | | - | | | |

Pada saat terbit Keputusan Wali Kota tentang Penghapusan Piutang, maka PPK SKPKD akan menghapus piutang yang sudah nyata-nyata tidak dapat tertagih tersebut dengan jurnal “Penyisihan Piutang ... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Piutang.....(sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

| Tanggal | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening | Debit | Kredit |
|----------|------------------|---------------|-----------------------|------------|------------|
| 3 Okt 22 | SK ... No.... | 1.1.10._._ | Penyisihan Piutang... | 30.000.000 | |
| | | - | | | |
| | | 1.1._._._._ | Piutang... | | 30.000.000 |

2.e. Pembentukan Investasi Jangka Pendek

Berdasarkan SK pembentukan Investasi Jangka Pendek, PPK SKPKD akan mengakui adanya penambahan aset lancar berupa investasi jangka pendek dengan mencatat jurnal “Investasi Jangka Pendek ... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “RK PPKD” di kredit.

| Tanggal | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening | Debit | Kredit |
|----------|------------------|------------------|-------------------------------|-------------|-------------|
| 7 Mei 22 | SK ... No.... | 1.1.2._._. | Investasi Jangka Pendek... | 400.000.000 | |
| | | 3.1.3.1.1.0 1 | RK PPKD | | 400.000.000 |

Transaksi ini secara bersamaan, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat dengan “RK SKPKD” di debit dan “Kas di Kasda” di kredit.

| Tanggal | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening | Debit | Kredit |
|----------|--------------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------|
| 5 Agt 21 | Nota Kredit No.... | 1.1.13.1.1.__ | RK SKPKD | 700.000.000 | |
| | | 1.1.1.1.1.01 | Kas di Kas Daerah | | 700.000.000 |

2.f. Pencairan Investasi Jangka Pendek

Dalam pelepasan atau pencairan investasi jangka pendek, berdasarkan dokumen transaksi yang dimiliki PPKD, PPK SKPKD mencatat pelepasan dan hasil dari investasi jangka pendek dengan menjurnal “RK PPKD” di debit serta “Pendapatan Bunga-LO” dan “Investasi Jangka Pendek” di kredit.

| Tanggal | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening | Debit | Kredit |
|-----------|------------------|------------------|-------------------------------|-------------|-------------|
| 13 Agt 22 | SK ... No.... | 3.1.3.1.1.0 1 | RK PPKD | 400.000.000 | |
| | | 7.1.4.7._. | Pendapatan Bunga- LO | | 10.000.000 |
| | | 1.1.2._._. | Investasi Jangka Pendek... | | 400.000.000 |

Transaksi ini secara bersamaan, Fungsi AKuntansi PPKD mencatat dengan “Kas di Kasda” di debit dan “RK SKPKD” di kredit.

| Tanggal | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening | Debit | Kredit |
|----------|--------------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------|
| 5 Agt 21 | Nota Kredit No.... | 1.1.1.1.1.01 | Kas di Kas Daerah | 700.000.000 | |
| | | 1.1.13.1.1.__ | RK SKPKD | | 700.000.000 |

Langkah 2

Klasifikasi Transaksi

- a. PPK-SKPD melakukan klasifikasi atas transaksi yang sebelumnya telah dicatat. Dalam proses ini, PPK-SKPD memindahkan data transaksi ke buku besar berdasarkan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. PPK-SKPD menghitung saldo di setiap buku besar berdasarkan klasifikasi yang dilakukan.
- c. Pencatatan ini dapat dilakukan secara elektronik dan merupakan integrasi dengan proses transaksi di setiap siklus pengelolaan keuangan daerah. Pencatatan ini didokumentasikan dalam buku Jurnal yang juga ditampilkan secara elektronik.

E. DOKUMEN

E.1 Buku Jurnal

| Pemerintah Kota Depok | | | | | |
|------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|--------------|---------------|
| Buku Jurnal | | | | | |
| SKPD : | | | | | |
| Tanggal | Nomor Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening | Debit | Kredit |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

E.2 Buku Besar

| Pemerintah Kota Depok | | | | | |
|-------------------------------|--------|-----|-------|--------|-------|
| Buku Besar | | | | | |
| SKPD | : | | | | |
| Kode Rekening | : | | | | |
| Nama Rekening | : | | | | |
| Pagu APBD^{*)} | : | | | | |
| Tanggal | Uraian | Ref | Debit | Kredit | Saldo |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

^{*)} : Untuk akun-akun komponen LRA

E.3 Neraca Saldo

| Pemerintah Kota Depok | | | | |
|------------------------------|---------------|---------------|-------|--------|
| Neraca Saldo | | | | |
| Per tanggal | | | | |
| SKPD | : | | | |
| No. Urut | Kode Rekening | Nama Rekening | Debit | Kredit |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

BAB V

SISTEM PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

A. KERANGKA REGULASI

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 185 sampai dengan Pasal 188;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lampiran), Bab VII – Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah; dan
3. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

B. DESKRIPSI PROSEDUR

Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi.

Laporan keuangan SKPD disusun dan disajikan oleh kepala SKPD selaku PA sebagai entitas akuntansi, sedangkan Laporan keuangan Pemerintah Daerah disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada Wali Kota dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Laporan keuangan Entitas Akuntansi, baik SKPD maupun SKPKD dilampiri dengan Surat Pernyataan Kepala SKPD/SKPKD yang menyatakan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan entitas akuntansi paling sedikit meliputi:

- 1) laporan realisasi anggaran;
- 2) neraca;
- 3) laporan operasional;

- 4) laporan perubahan ekuitas; dan
- 5) catatan atas laporan keuangan.

Sedangkan laporan keuangan Pemerintah Daerah paling sedikit meliputi:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 3) Neraca
- 4) Laporan Operasional
- 5) Laporan Arus Kas
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas
- 7) Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Arus Kas (LAK) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) disusun dan disajikan oleh Bendahara Umum Daerah sebagai bagian dari Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas Pelaporan. LAK dan LPSAL dilampiri dengan surat pernyataan BUD yang menyatakan pengelolaan kas yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Proses penyusunan Laporan Keuangan mengandung informasi, aliran data, penggunaan, dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

C. PIHAK TERKAIT

Pihak yang terkait dengan proses pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. PPK SKPD
 - a. menyusun laporan keuangan entitas akuntansi;
 - b. menyampaikan laporan keuangan SKPD kepada Pengguna Anggaran.

2. Pengguna Anggaran
 - a. Melakukan otorisasi atas laporan keuangan SKPD;
 - b. menyampaikan laporan keuangan SKPD kepada PPKD dan Wali Kota.
3. Fungsi Akuntansi PPKD
 - a. Melakukan proses konsolidasi dan menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah.
4. PPKD
 - a. Memberikan otorisasi atas laporan keuangan Pemerintah Daerah.
 - b. menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah kepada Wali Kota.

D. PROSEDUR PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

D.1 Penyusunan Laporan Keuangan Entitas Akuntansi

Langkah 1

Pengisian Neraca Saldo

PPK SKPD melakukan rekapitulasi saldo-saldo buku besar menjadi neraca saldo.

Langkah 2

Pembuatan Jurnal Penyesuaian

PPK SKPD membuat jurnal penyesuaian. Jurnal ini dibuat dengan tujuan melakukan penyesuaian atas saldo pada akun-akun tertentu dan pengakuan atas transaksi-transaksi yang bersifat akrual.

Jurnal penyesuaian yang diperlukan antara lain digunakan untuk:

- (a) Koreksi kesalahan/pemindahbukuan
- (b) Pencatatan jurnal yang belum dilakukan
- (c) Pencatatan piutang, persediaan dan atau aset lainnya pada akhir tahun

Langkah 3

Pembuatan Neraca Saldo setelah Penyesuaian

PPK SKPD melakukan penyesuaian atas neraca saldo berdasarkan jurnal penyesuaian yang telah dibuat sebelumnya.

Langkah 4

Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran

Berdasarkan Neraca Saldo yang telah disesuaikan, PPK SKPD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Laporan Realisasi Anggaran, yaitu Pendapatan LRA, Belanja, dan Pembiayaan (kode rekening yang berawalan 4, 5, dan 6) dan kemudian membuat Laporan Realisasi Anggaran.

Bersamaan dengan pembuatan LRA, PPK SKPD juga membuat jurnal penutup untuk menutup akun-akun LRA. Prinsip penutupan ini adalah membuat nilai akun-akun LRA menjadi 0. Jurnal penutup tersebut dilakukan dalam 3 tahap, sebagai berikut:

- a. Jurnal Penutup untuk menutup jurnal penganggaran yang dibuat di awal tahun anggaran

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Apropriasi Belanja | xxx |
| Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan | xxx |
| Estimasi Perubahan SAL | xxx |
| Estimasi Pendapatan | xxx |
| Estimasi Penerimaan Pembiayaan | xxx |

- b. Jurnal Penutup untuk realisasi anggaran, ditutup pada akun surplus/defisit - LRA

| | |
|------------------------|-----|
| Pendapatan - LRA | xxx |
| Penerimaan Pembiayaan | xxx |
| Belanja | xxx |
| Pengeluaran Pembiayaan | xxx |
| Surplus/Defisit - LRA | xxx |

- c. Jurnal Penutup untuk menutup akun surplus/defisit – LRA pada akun Estimasi Perubahan SAL yang terbentuk selama transaksi.

| | |
|------------------------|-----|
| Surplus/Defisit – LRA | xxx |
| Estimasi Perubahan SAL | xxx |

Langkah 5

Penyusunan Laporan Operasional

Berdasarkan Neraca Saldo yang telah disesuaikan, PPK SKPD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Laporan Operasional, yaitu Pendapatan LO dan Beban (kode rekening yang berawalan 7 dan 8) dan kemudian membuat Laporan Operasional.

Bersamaan dengan pembuatan LO, PPK SKPD juga membuat jurnal penutup untuk menutup akun-akun LO. Prinsip penutupan ini adalah membuat nilai akun-akun LO menjadi 0. Berikut contoh jurnal penutup LO.

| | |
|----------------------|-----|
| Pendapatan – LO | xxx |
| Beban | xxx |
| Surplus/Defisit – LO | xxx |

Langkah 6

Penyusunan Neraca

Berdasarkan Neraca Saldo yang telah disesuaikan, PPK SKPD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Neraca, yaitu Aset, Kewajiban, dan Ekuitas (kode rekening yang berawalan 1, 2, dan 3) dan kemudian membuat Neraca. Bersamaan dengan pembuatan Neraca, Fungsi Akuntansi PPKD membuat jurnal penutup akhir untuk menutup akun Surplus (Defisit) – LO ke akun Ekuitas. Berikut contoh penutup akhir.

| | |
|----------------------|-----|
| Surplus/Defisit – LO | xxx |
| Ekuitas | xxx |

Langkah 7

Penyusunan Laporan Perubahan Ekuitas

Selanjutnya, PPK SKPD membuat Laporan Perubahan Ekuitas menggunakan data Ekuitas Awal dan data perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari Laporan Operasional yang telah dibuat sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas ini akan menggambarkan pergerakan ekuitas akuntansi.

Langkah 8

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan

PPK SKPD menyusun Catatan atas Laporan Keuangan. CaLK ini meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Hal-hal yang diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan entitas akuntansi antara lain:

- a) Informasi umum tentang Entitas Akuntansi;
- b) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- c) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- d) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- e) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- f) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Langkah 9

Pembuatan Surat Pernyataan Tanggung Jawab

- PPK SKPD mengajukan kelima laporan keuangan yang telah dibuatnya tersebut kepada Pengguna Anggaran.
- Pengguna anggaran dan/atau PPKD kemudian meneliti, menyetujui, dan membuat Surat Pernyataan Kepala SKPD/SKPKD yang menyatakan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan SKPD beserta Surat Pernyataan kepada Walikota melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keseluruhan proses penyusunan Laporan Keuangan Entitas Akuntansi di atas mengandung informasi, aliran data, penggunaan, dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

D.2 Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Pemerintah Daerah

Langkah 1

Penyiapan Kertas Kerja Konsolidasi

- Fungsi Akuntansi PPKD menyiapkan kertas kerja konsolidasi (*worksheet*) dengan lajur sesuai banyaknya SKPD dan SKPKD sebagai alat untuk menyusun Neraca Saldo pemerintah daerah. Kertas kerja konsolidasi berguna untuk mempermudah proses pembuatan laporan keuangan yang dihasilkan secara manual.

- Contoh format kertas kerja di bawah ini menunjukkan informasi minimal yang harus ada di setiap pengembangan berikutnya.

| Kode Rekening | Nama Rekening | NS SKPD A | | NS SKPD B | | NS SKPD dst | | NS SKPKD | | Jurnal Eliminasi | | NS Pemda | |
|---------------|---------------|-----------|---|-----------|---|-------------|---|----------|---|------------------|---|----------|---|
| | | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

- Fungsi Akuntansi PPKD memindahkan data pada Neraca Saldo SKPD dan Neraca Saldo SKPKD ke dalam kertas kerja konsolidasi. Neraca Saldo SKPD dan Neraca Saldo SKPKD yang dimasukkan ke dalam kertas kerja konsolidasi adalah Neraca Saldo yang sudah disesuaikan.
- Fungsi Akuntansi PPKD membuat jurnal eliminasi untuk menghapus akun transitoris yaitu RK PPKD dan RK SKPD, serta RK SKPKD. Jurnal eliminasi tersebut merupakan catatan dalam kertas kerja konsolidasi dan tidak mempengaruhi pencatatan di entitas akuntansi
- Fungsi Akuntansi PPKD mengisi Neraca Saldo Pemerintah Daerah berdasarkan Neraca Saldo SKPD dan Neraca Saldo SKPKD serta jurnal eliminasi,

Penyusunan Laporan Keuangan yang dilakukan secara elektronik tidak membutuhkan aktivitas khusus untuk penyusunan kertas kerja ini, melainkan kerja kerja dapat diproduksi secara langsung (sebagai *report*).

Langkah 2

Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran

Fungsi Akuntansi PPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen LRA dalam Neraca Saldo Pemerintah Daerah, yaitu Pendapatan LRA, Belanja, dan Pembiayaan (kode rekening yang berawalan 4, 5, dan 6) dan kemudian membuat Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah.

Langkah 3

Penyusunan Laporan Operasional

Fungsi Akuntansi PPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen LO dalam Neraca Saldo Pemerintah Daerah, yaitu Pendapatan LO dan Beban (kode rekening yang berawalan 7 dan 8) dan kemudian membuat Laporan Operasional Pemerintah Daerah.

Langkah 4

Penyusunan Neraca

Fungsi Akuntansi PPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Neraca dalam Neraca Saldo Pemerintah Daerah, yaitu Aset, Kewajiban, dan Ekuitas (kode rekening yang berawalan 1, 2, dan 3) dan kemudian membuat Neraca Pemerintah Daerah.

Langkah 5

Penyusunan Laporan Perubahan SAL

BUD dibantu oleh Fungsi Akuntansi PPKD menyusun Laporan Perubahan SAL dengan data yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah yang telah dibuat sebelumnya, Laporan Perubahan SAL ini merupakan akumulasi SiLPA periode berjalan dan tahun-tahun sebelumnya.

BUD menyusun surat pernyataan BUD yang menyatakan pengelolaan kas yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Langkah 6

Penyusunan Laporan Perubahan Ekuitas

Fungsi Akuntansi PPKD menyusun Laporan Perubahan Ekuitas menggunakan data Ekuitas Awal dan data perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari Laporan Operasional yang telah dibuat sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas ini akan menggambarkan pergerakan ekuitas pelaporan.

Langkah 7

Penyusunan Laporan Arus Kas

BUD dibantu oleh Fungsi Akuntansi PPKD menyusun Laporan Arus Kas menggunakan data dari buku besar kas dan juga jurnal. Inti unsur dari Laporan Arus Kas ialah penerimaan kas dan pengeluaran kas. Semua transaksi terkait Arus Kas tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas transitoris.

BUD menyusun surat pernyataan BUD yang menyatakan pengelolaan kas yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Langkah 9

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan

Fungsi Akuntansi PPKD menyusun Catatan atas Laporan Keuangan entitas pelaporan. CaLK ini meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan SAL, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas. Hal-hal yang diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan entitas pelaporan antara lain:

- a) Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;

- f) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- g) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Langkah 10

Pembuatan Surat Pernyataan Tanggung Jawab

- PPKD menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah disusun kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Walikota kemudian meneliti, menyetujui, dan membuat Surat Pernyataan Walikota yang menyatakan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Walikota menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Keseluruhan proses penyusunan Laporan Keuangan Entitas Akuntansi di atas mengandung informasi, aliran data, penggunaan, dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

E. DOKUMEN

E.1 LRA SKPD

PEMERINTAH KOTA DEPOK
SKPD _____
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

| (Dalam Rupiah) | | | | | |
|----------------|--|----------|-----------|---|-----------|
| No. | Uraian | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| 1 | PENDAPATAN | | | | |
| 2 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | | | |
| 3 | Pendapatan Pajak Daerah | | | | |
| 4 | Pendapatan Retribusi Daerah | | | | |
| 5 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | | | | |
| 6 | Lain - lain PAD yang sah | | | | |
| 7 | Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6) | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | JUMLAH PENDAPATAN (7) | | | | |
| 10 | BELANJA | | | | |
| 11 | BELANJA OPERASI | | | | |
| 12 | Belanja Pegawai | | | | |
| 13 | Belanja Barang dan Jasa | | | | |
| 14 | Jumlah Belanja Operasi (12 s/d 13) | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | BELANJA MODAL | | | | |
| 17 | Belanja Modal Tanah | | | | |
| 18 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | | |
| 19 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | | | | |
| 20 | Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan | | | | |
| 21 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | | | | |
| 22 | Belanja Modal Aset Lainnya | | | | |
| 23 | Jumlah Belanja Modal (17 s/d 22) | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | JUMLAH BELANJA (14 + 23) | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | SURPLUS/DEFISIT (9 - 25) | | | | |

E.2 LO SKPD

PEMERINTAH KOTA DEPOK
SKPD _____
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

| No. | Uraian | 20X1 | 20X0 | Kenaikan/ Penurunan | % |
|-----|---|------|------|------------------------|---|
| | KEGIATAN OPERASIONAL | | | | |
| 1 | PENDAPATAN | | | | |
| 2 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | | | |
| 3 | Pendapatan Pajak Daerah* | | | | |
| 4 | Pendapatan Retribusi Daerah | | | | |
| 5 | Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 4) | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | JUMLAH PENDAPATAN (5) | | | | |
| 8 | BEBAN | | | | |
| 9 | BEBAN OPERASI | | | | |
| 10 | Beban Pegawai | | | | |
| 11 | Beban Barang dan Jasa | | | | |
| 12 | Jumlah Beban Operasi (10 s/d 11) | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI | | | | |
| 15 | Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin | | | | |
| 16 | Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan | | | | |
| 17 | Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan | | | | |
| 18 | Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya | | | | |
| 19 | Beban Penyusutan Aset Lainnya | | | | |
| 20 | Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud | | | | |
| 21 | Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi (15 s/d 20) | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | JUMLAH BEBAN (12 + 21) | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | SURPLUS/DEFISIT LO (7 - 23) | | | | |

E.3 Neraca SKPD

PEMERINTAH KOTA DEPOK
SKPD _____
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

| (Dalam Rupiah) | | | |
|----------------|---|------|------|
| No. | Uraian | 20X1 | 20X0 |
| 1 | ASET | | |
| 2 | | | |
| 3 | ASET LANCAR | | |
| 4 | Kas dan Setara Kas | | |
| 5 | Kas di Bendahara Pengeluaran | | |
| 6 | Kas di Bendahara Penerimaan | | |
| 7 | Piutang Pajak* | | |
| 8 | Piutang Retribusi | | |
| 9 | Piutang Lainnya | | |
| 10 | Penyisihan Piutang | | |
| 11 | Beban Dibayar Dimuka | | |
| 12 | Persediaan | | |
| 13 | Jumlah Aset Lancar (4 s/d 24) | | |
| 14 | | | |
| 15 | ASET TETAP | | |
| 16 | Tanah | | |
| 17 | Peralatan dan Mesin | | |
| 18 | Gedung dan Bangunan | | |
| 19 | Jalan, Irigasi, dan Jaringan | | |
| 20 | Aset Tetap Lainnya | | |
| 21 | Konstruksi dalam Pengerjaan | | |
| 22 | Akumulasi Penyusutan | | |
| 23 | Jumlah Aset Tetap (42 s/d 48) | | |
| 24 | | | |
| 25 | ASET LAINNYA | | |
| 26 | Tagihan Jangka Panjang | | |
| 27 | Tagihan Penjualan Angsuran | | |
| 28 | Tuntutan Ganti Rugi | | |
| 29 | Kemitraan dengan Pihak Ketiga | | |
| 30 | Aset Tak Berwujud | | |
| 31 | Aset Lain - lain | | |
| 32 | Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud | | |
| 33 | Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya | | |
| 34 | Jumlah Aset Lainnya (56 s/d 63) | | |
| 35 | | | |
| 36 | JUMLAH ASET (25 + 39 + 49 + 53 + 64) | | |
| 37 | | | |
| 38 | KEWAJIBAN | | |
| 39 | | | |
| 40 | KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | | |
| 41 | Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | | |
| 42 | Pendapatan Diterima Dimuka | | |
| 43 | Utang Belanja | | |
| 44 | Utang Jangka Pendek Lainnya | | |
| 45 | Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (71 s/d 77) | | |
| 46 | | | |
| 47 | JUMLAH KEWAJIBAN (78 + 86) | | |
| 48 | | | |
| 49 | EKUITAS | | |
| 50 | EKUITAS | | |
| 51 | Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan | | |
| 52 | JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (87 + 90) | | |

E.4 LPE SKPD

PEMERINTAH KOTA DEPOK
SKPD _____
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

| Uraian | 20X1 | 20X0 |
|--|------|------|
| Ekuitas Awal | | |
| Surplus/Defisit LO | | |
| Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar: | | |
| Koreksi Nilai Persediaan | | |
| Selisih Revaluasi Aset Tetap | | |
| Lain - lain | | |
| Ekuitas Akhir | | |

E.5 CaLK SKPD

PEMERINTAH KOTA DEPOK
SKPD _____
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1

| PENDAHULUAN | |
|-------------|--|
| BAB I | Pendahuluan |
| | 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD |
| | 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD |
| | 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD |
| BAB II | Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD |
| | 2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah |
| | 2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan |
| BAB III | Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah |
| | 3.1 Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD |
| | 3.1.1 Pendapatan - LRA |
| | 3.1.2 Belanja |
| | 3.1.3 Pendapatan - LO |
| | 3.1.4 Beban |
| | 3.1.5 Aset |
| | 3.1.6 Kewajiban |
| | 3.1.7 Ekuitas Dana |
| | 3.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah |
| BAB IV | Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan SKPD |
| BAB V | Penutup |

E.6 LRA SKPKD

PEMERINTAH KOTA DEPOK
SKPKD _____
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

| (Dalam Rupiah) | | | | | |
|----------------|--|----------|-----------|---|-----------|
| No. | Uraian | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| 1 | PENDAPATAN | | | | |
| 2 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | | | |
| 3 | Pendapatan Pajak Daerah | | | | |
| 4 | Pendapatan Retribusi Daerah | | | | |
| 5 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | | | | |
| 6 | Lain - lain PAD yang sah | | | | |
| 7 | Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6) | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | PENDAPATAN TRANSFER | | | | |
| 10 | PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN | | | | |
| 11 | Dana Bagi Hasil | | | | |
| 12 | Dana Alokasi Umum | | | | |
| 13 | Dana Alokasi Khusus - Fisik | | | | |
| 14 | Dana Alokasi Khusus - Non Fisik | | | | |
| 15 | Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14) | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA | | | | |
| 18 | Dana Insentif Daerah | | | | |
| 19 | Dana Otonomi Khusus | | | | |
| 20 | Dana Keistimewaan | | | | |
| 21 | Dana Desa | | | | |
| 22 | Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18 s/d 21) | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | | | | |
| 25 | Pendapatan Bagi Hasil | | | | |
| 26 | Bantuan Keuangan | | | | |
| 27 | Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah (25 s/d 26) | | | | |
| 28 | Total Pendapatan Transfer (15 + 22 + 27) | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | | | | |
| 31 | Pendapatan Hibah | | | | |
| 32 | Pendapatan Dana Darurat | | | | |
| 33 | Pendapatan Lainnya | | | | |
| 34 | Jumlah Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah (31 s/d 33) | | | | |
| 35 | JUMLAH PENDAPATAN (7 + 28 + 34) | | | | |
| 36 | BELANJA | | | | |
| 37 | BELANJA OPERASI | | | | |
| 38 | Belanja Pegawai | | | | |
| 39 | Belanja Barang dan Jasa | | | | |
| 40 | Belanja Bunga | | | | |
| 41 | Belanja Subsidi | | | | |
| 42 | Belanja Hibah | | | | |
| 43 | Belanja Bantuan Sosial | | | | |
| 44 | Jumlah Belanja Operasi (38 s/d 43) | | | | |
| 45 | | | | | |
| 46 | BELANJA MODAL | | | | |
| 47 | Belanja Modal Tanah | | | | |
| 48 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | | |
| 49 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | | | | |
| 50 | Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan | | | | |
| 51 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | | | | |
| 52 | Belanja Modal Aset Lainnya | | | | |
| 53 | Jumlah Belanja Modal (47 s/d 52) | | | | |
| 54 | | | | | |
| 55 | BELANJA TAK TERDUGA | | | | |
| 56 | Belanja Tak Terduga | | | | |
| 57 | Jumlah Belanja Tak Terduga (56) | | | | |
| 58 | | | | | |

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|
| 59 | BELANJA TRANSFER | | | | |
| 60 | Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| 61 | Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi | | | | |
| 62 | Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa | | | | |
| 63 | Jumlah Belanja Transfer (60 s/d 62) | | | | |
| 64 | JUMLAH BELANJA (44 + 53 + 57 + 63) | | | | |
| 65 | | | | | |
| 66 | SURPLUS/DEFISIT (35 - 64) | | | | |
| 67 | | | | | |
| 68 | PEMBIAYAAN | | | | |
| 69 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | | | | |
| 70 | Penggunaan SILPA | | | | |
| 71 | Pencairan Dana Cadangan | | | | |
| 72 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | | | | |
| 73 | Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat | | | | |
| 74 | Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain | | | | |
| 75 | Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank | | | | |
| 76 | Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank | | | | |
| 77 | Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah) | | | | |
| 78 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | | | | |
| 79 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | | | | |
| 80 | Jumlah Penerimaan Pembiayaan (70 s/d 79) | | | | |
| 81 | | | | | |
| 82 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | | | | |
| 83 | Pembentukan Dana Cadangan | | | | |
| 84 | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | | | | |
| 85 | Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat | | | | |
| 86 | Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain | | | | |
| 87 | Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank | | | | |
| 88 | Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank | | | | |
| 89 | Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah) | | | | |
| 90 | Pemberian Pinjaman Daerah | | | | |
| 91 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | | | | |
| 92 | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (83 s/d 91) | | | | |
| 93 | PEMBIAYAAN NETTO (80 - 92) | | | | |
| 94 | | | | | |
| 95 | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (66 + 93) | | | | |

E.7 LO SKPKD

PEMERINTAH KOTA DEPOK
SKPKD _____
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

| (Dalam Rupiah) | | | | | |
|----------------|--|------|------|------------------------|---|
| No. | Uraian | 20X1 | 20X0 | Kenaikan/ Penurunan | % |
| | KEGIATAN OPERASIONAL | | | | |
| 1 | PENDAPATAN | | | | |
| 2 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | | | |
| 3 | Pendapatan Pajak Daerah | | | | |
| 4 | Pendapatan Retribusi Daerah | | | | |
| 5 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | | | | |
| 6 | Lain - lain PAD yang sah | | | | |
| 7 | Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6) | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | PENDAPATAN TRANSFER | | | | |
| 10 | PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN | | | | |
| 11 | Dana Bagi Hasil | | | | |
| 12 | Dana Alokasi Umum | | | | |
| 13 | Dana Alokasi Khusus - Fisik | | | | |
| 14 | Dana Alokasi Khusus - Non Fisik | | | | |
| 15 | Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14) | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA | | | | |
| 18 | Dana Insentif Daerah | | | | |
| 19 | Dana Otonomi Khusus | | | | |
| 20 | Dana Keistimewaan | | | | |
| 21 | Dana Desa | | | | |
| 22 | Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18 s/d 21) | | | | |

| | | | | |
|----|---|--|--|--|
| 23 | | | | |
| 24 | PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | | | |
| 25 | Pendapatan Bagi Hasil | | | |
| 26 | Bantuan Keuangan | | | |
| 27 | Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah (25 s/d 26) | | | |
| 28 | Total Pendapatan Transfer (15 + 22 + 27) | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | | | |
| 31 | Pendapatan Hibah | | | |
| 32 | Pendapatan Dana Darurat | | | |
| 33 | Pendapatan Lainnya | | | |
| 34 | Jumlah Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah (31 s/d 33) | | | |
| 35 | JUMLAH PENDAPATAN (7 + 28 + 34) | | | |
| 36 | <u>BEBAN</u> | | | |
| 37 | BEBAN OPERASI | | | |
| 38 | Beban Pegawai | | | |
| 39 | Beban Barang dan Jasa | | | |
| 40 | Beban Bunga | | | |
| 41 | Beban Subsidi | | | |
| 42 | Beban Hibah | | | |
| 43 | Beban Bantuan Sosial | | | |
| 44 | Jumlah Beban Operasi (38 s/d 43) | | | |
| 45 | | | | |
| 46 | BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI | | | |
| 47 | Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin | | | |
| 48 | Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan | | | |
| 49 | Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan | | | |
| 50 | Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya | | | |
| 51 | Beban Penyusutan Aset Lainnya | | | |
| 52 | Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud | | | |
| 53 | Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi (47 s/d 52) | | | |
| 54 | | | | |
| 55 | BEBAN TRANSFER | | | |
| 56 | Beban Bagi Hasil | | | |
| 57 | Beban Bantuan Keuangan | | | |
| 58 | Jumlah Beban Transfer (56 s/d 57) | | | |
| 59 | | | | |
| 60 | BEBAN TAK TERDUGA | | | |
| 61 | Beban Tak Terduga | | | |
| 62 | Jumlah Beban Tak Terduga (61) | | | |
| 63 | JUMLAH BEBAN (44 + 53 + 58 + 62) | | | |
| 64 | | | | |
| 65 | SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (35 - 63) | | | |
| 66 | | | | |
| 67 | <u>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</u> | | | |
| 68 | SURPLUS NON OPERASIONAL | | | |
| 69 | Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar | | | |
| 70 | Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang | | | |
| 71 | Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | | | |
| 72 | Jumlah Surplus Non Operasional (69 s/d 71) | | | |
| 73 | | | | |
| 74 | DEFISIT NON OPERASIONAL | | | |
| 75 | Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar | | | |
| 76 | Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang | | | |
| 77 | Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | | | |
| 78 | Jumlah Defisit Non Operasional (75 s/d 77) | | | |
| 79 | JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (72 - 78) | | | |
| 80 | | | | |
| 81 | SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (65 + 79) | | | |
| 82 | | | | |
| 83 | <u>POS LUAR BIASA</u> | | | |
| 84 | PENDAPATAN LUAR BIASA | | | |
| 85 | Pendapatan Luar Biasa | | | |
| 86 | Jumlah Pendapatan Luar Biasa (85) | | | |
| 87 | | | | |
| 88 | BEBAN LUAR BIASA | | | |
| 89 | Beban Luar Biasa | | | |
| 90 | Jumlah Beban Luar Biasa (89) | | | |
| 91 | POS LUAR BIASA (86 - 90) | | | |
| 92 | | | | |
| 93 | SURPLUS/DEFISIT LO (81 + 91) | | | |

E.8 Neraca SKPKD

PEMERINTAH KOTA DEPOK
SKPKD _____
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

| | | (Dalam Rupiah) | |
|-----|---|----------------|------|
| No. | Uraian | 20X1 | 20X0 |
| 1 | ASET | | |
| 2 | | | |
| 3 | ASET LANCAR | | |
| 4 | Kas dan Setara Kas | | |
| 5 | Kas di Kas Daerah | | |
| 6 | Kas di Bendahara Pengeluaran | | |
| 7 | Kas di Bendahara Penerimaan | | |
| 8 | Kas di BLUD | | |
| 9 | Kas Dana BOS | | |
| 10 | Kas Dana Kapitasi pada FKTP | | |
| 11 | Kas Lainnya | | |
| 12 | Setara Kas | | |
| 13 | Investasi Jangka Pendek | | |
| 14 | Piutang Pajak | | |
| 15 | Piutang Retribusi | | |
| 16 | Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | | |
| 17 | Piutang Lain-lain PAD yang Sah | | |
| 18 | Piutang Transfer Pemerintah Pusat | | |
| 19 | Piutang Transfer Antar Daerah | | |
| 20 | Piutang Lainnya | | |
| 21 | Penyisihan Piutang | | |
| 22 | Beban Dibayar Dimuka | | |
| 23 | Persediaan | | |
| 24 | Aset Untuk Dikonsolidasikan | | |
| 25 | Jumlah Aset Lancar (4 s/d 24) | | |
| 26 | | | |
| 27 | INVESTASI JANGKA PANJANG | | |
| 28 | Investasi Non Permanen | | |
| 29 | Investasi kepada BUMN | | |
| 30 | Investasi kepada BUMD | | |
| 31 | Investasi dalam Obligasi | | |
| 32 | Investasi dalam Proyek Pembangunan | | |
| 33 | Dana Bergulir | | |
| 34 | Jumlah Investasi Non Permanen (29 s/d 33) | | |
| 35 | Investasi Permanen | | |
| 36 | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | | |
| 37 | Investasi - Pemberian Pinjaman Daerah | | |
| 38 | Jumlah Investasi Permanen (36 s/d 37) | | |
| 39 | Jumlah Investasi Jangka Panjang (34 + 38) | | |
| 40 | | | |
| 41 | ASET TETAP | | |
| 42 | Tanah | | |
| 43 | Peralatan dan Mesin | | |
| 44 | Gedung dan Bangunan | | |
| 45 | Jalan, Irigasi, dan Jaringan | | |
| 46 | Aset Tetap Lainnya | | |
| 47 | Konstruksi dalam Pengerjaan | | |
| 48 | Akumulasi Penyusutan | | |
| 49 | Jumlah Aset Tetap (42 s/d 48) | | |
| 50 | | | |

| | | | |
|----|--|--|--|
| 51 | DANA CADANGAN | | |
| 52 | Dana Cadangan | | |
| 53 | Jumlah Dana Cadangan (52) | | |
| 54 | | | |
| 55 | ASET LAINNYA | | |
| 56 | Tagihan Jangka Panjang | | |
| 57 | Tagihan Penjualan Angsuran | | |
| 58 | Tuntutan Ganti Rugi | | |
| 59 | Kemitraan dengan Pihak Ketiga | | |
| 60 | Aset Tak Berwujud | | |
| 61 | Aset Lain - lain | | |
| 62 | Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud | | |
| 63 | Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya | | |
| 64 | Jumlah Aset Lainnya (56 s/d 63) | | |
| 65 | | | |
| 66 | JUMLAH ASET (25 + 39 + 49 + 53 + 64) | | |
| 67 | | | |
| 68 | <u>KEWAJIBAN</u> | | |
| 69 | | | |
| 70 | KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | | |
| 71 | Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | | |
| 72 | Utang Bunga | | |
| 73 | Utang Pinjaman Jangka Pendek | | |
| 74 | Bagian Lancar Utang Jangka Panjang | | |
| 75 | Pendapatan Diterima Dimuka | | |
| 76 | Utang Belanja | | |
| 77 | Utang Jangka Pendek Lainnya | | |
| 78 | Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (71 s/d 77) | | |
| 79 | | | |
| 80 | KEWAJIBAN JANGKA PANJANG | | |
| 81 | Utang kepada Pemerintah Pusat | | |
| 82 | Utang kepada Lembaga Keuangan Bank | | |
| 83 | Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank | | |
| 84 | Utang kepada Masyarakat (Obligasi) | | |
| 85 | Premium (Diskonto) Obligasi | | |
| 86 | Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (81 s/d 85) | | |
| 87 | JUMLAH KEWAJIBAN (78 + 86) | | |
| 88 | | | |
| 89 | <u>EKUITAS</u> | | |
| 90 | EKUITAS | | |
| 91 | JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (87 + 90) | | |

E.9 LPE SKPKD

PEMERINTAH KOTA DEPOK
SKPKD _____
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

| Uraian | 20X1 | 20X0 |
|--|------|------|
| Ekuitas Awal | | |
| Surplus/Defisit LO | | |
| Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar: | | |
| Koreksi Nilai Persediaan | | |
| Selisih Revaluasi Aset Tetap | | |
| Lain - lain | | |
| Ekuitas Akhir | | |

E.10 CaLK SKPKD

PEMERINTAH KOTA DEPOK
SKPKD _____
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1

| PENDAHULUAN | |
|-------------|--|
| BAB I | Pendahuluan |
| | 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPKD |
| | 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPKD |
| | 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPKD |
| BAB II | Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPKD |
| | 2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah |
| | 2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan |
| BAB III | Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah |
| | 3.1 Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPKD |
| | 3.1.1 Pendapatan - LRA |
| | 3.1.2 Belanja |
| | 3.1.3 Pembiayaan |
| | 3.1.4 Pendapatan - LO |
| | 3.1.5 Beban |
| | 3.1.6 Aset |
| | 3.1.7 Kewajiban |
| | 3.1.8 Ekuitas Dana |
| | 3.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah |
| BAB IV | Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan SKPKD |
| BAB V | Penutup |

E.11 LRA Pemerintah Daerah

PEMERINTAH KOTA DEPOK
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

| (Dalam Rupiah) | | | | | |
|----------------|--|------------------|-------------------|---|-------------------|
| No. | Uraian | Anggaran 20X1 | Realisasi 20X1 | % | Realisasi 20x0 |
| 1 | PENDAPATAN | | | | |
| 2 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | | | |
| 3 | Pendapatan Pajak Daerah | | | | |
| 4 | Pendapatan Retribusi Daerah | | | | |
| 5 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | | | | |
| 6 | Lain - lain PAD yang sah | | | | |
| 7 | Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6) | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | PENDAPATAN TRANSFER | | | | |
| 10 | PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN | | | | |
| 11 | Dana Bagi Hasil | | | | |
| 12 | Dana Alokasi Umum | | | | |
| 13 | Dana Alokasi Khusus - Fisik | | | | |
| 14 | Dana Alokasi Khusus - Non Fisik | | | | |
| 15 | Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14) | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA | | | | |
| 18 | Dana Insentif Daerah | | | | |
| 19 | Dana Otonomi Khusus | | | | |
| 20 | Dana Keistimewaan | | | | |
| 21 | Dana Desa | | | | |
| 22 | Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18 s/d 21) | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | | | | |
| 25 | Pendapatan Bagi Hasil | | | | |
| 26 | Bantuan Keuangan | | | | |
| 27 | Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah (25 s/d 26) | | | | |
| 28 | Total Pendapatan Transfer (15 + 22 + 27) | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | | | | |
| 31 | Pendapatan Hibah | | | | |
| 32 | Pendapatan Dana Darurat | | | | |
| 33 | Pendapatan Lainnya | | | | |
| 34 | Jumlah Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah (31 s/d 33) | | | | |
| 35 | JUMLAH PENDAPATAN (7 + 28 + 34) | | | | |
| 36 | BELANJA | | | | |
| 37 | BELANJA OPERASI | | | | |
| 38 | Belanja Pegawai | | | | |
| 39 | Belanja Barang dan Jasa | | | | |
| 40 | Belanja Bunga | | | | |
| 41 | Belanja Subsidi | | | | |
| 42 | Belanja Hibah | | | | |
| 43 | Belanja Bantuan Sosial | | | | |
| 44 | Jumlah Belanja Operasi (38 s/d 43) | | | | |
| 45 | | | | | |
| 46 | BELANJA MODAL | | | | |
| 47 | Belanja Modal Tanah | | | | |
| 48 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | | |
| 49 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | | | | |
| 50 | Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan | | | | |
| 51 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | | | | |
| 52 | Belanja Modal Aset Lainnya | | | | |
| 53 | Jumlah Belanja Modal (47 s/d 52) | | | | |
| 54 | | | | | |
| 55 | BELANJA TAK TERDUGA | | | | |
| 56 | Belanja Tak Terduga | | | | |
| 57 | Jumlah Belanja Tak Terduga (56) | | | | |
| 58 | | | | | |

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|
| 59 | BELANJA TRANSFER | | | | |
| 60 | Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| 61 | Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi | | | | |
| 62 | Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa | | | | |
| 63 | Jumlah Belanja Transfer (60 s/d 62) | | | | |
| 64 | JUMLAH BELANJA (44 + 53 + 57 + 63) | | | | |
| 65 | | | | | |
| 66 | SURPLUS/DEFISIT (35 - 64) | | | | |
| 67 | | | | | |
| 68 | PEMBIAYAAN | | | | |
| 69 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | | | | |
| 70 | Penggunaan SILPA | | | | |
| 71 | Pencairan Dana Cadangan | | | | |
| 72 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | | | | |
| 73 | Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat | | | | |
| 74 | Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain | | | | |
| 75 | Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank | | | | |
| 76 | Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank | | | | |
| 77 | Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah) | | | | |
| 78 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | | | | |
| 79 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | | | | |
| 80 | Jumlah Penerimaan Pembiayaan (70 s/d 79) | | | | |
| 81 | | | | | |
| 82 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | | | | |
| 83 | Pembentukan Dana Cadangan | | | | |
| 84 | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | | | | |
| 85 | Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat | | | | |
| 86 | Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain | | | | |
| 87 | Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank | | | | |
| 88 | Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank | | | | |
| 89 | Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah) | | | | |
| 90 | Pemberian Pinjaman Daerah | | | | |
| 91 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | | | | |
| 92 | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (83 s/d 91) | | | | |
| 93 | PEMBIAYAAN NETTO (80 - 92) | | | | |
| 94 | | | | | |
| 95 | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (66 + 93) | | | | |

E.12 LO Pemerintah Daerah

PEMERINTAH KOTA DEPOK
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

| No. | Uraian | 20X1 | 20X0 | Kenaikan/ Penurunan | % |
|-----|--|------|------|------------------------|---|
| | KEGIATAN OPERASIONAL | | | | |
| 1 | PENDAPATAN | | | | |
| 2 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | | | |
| 3 | Pendapatan Pajak Daerah | | | | |
| 4 | Pendapatan Retribusi Daerah | | | | |
| 5 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | | | | |
| 6 | Lain - lain PAD yang sah | | | | |
| 7 | Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6) | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | PENDAPATAN TRANSFER | | | | |
| 10 | PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN | | | | |
| 11 | Dana Bagi Hasil | | | | |
| 12 | Dana Alokasi Umum | | | | |
| 13 | Dana Alokasi Khusus - Fisik | | | | |
| 14 | Dana Alokasi Khusus - Non Fisik | | | | |
| 15 | Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14) | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA | | | | |
| 18 | Dana Insentif Daerah | | | | |
| 19 | Dana Otonomi Khusus | | | | |
| 20 | Dana Keistimewaan | | | | |
| 21 | Dana Desa | | | | |
| 22 | Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18 s/d 21) | | | | |
| 23 | | | | | |

| | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|
| 24 | PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | | | | |
| 25 | Pendapatan Bagi Hasil | | | | |
| 26 | Bantuan Keuangan | | | | |
| 27 | Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah (25 s/d 26) | | | | |
| 28 | Total Pendapatan Transfer (15 + 22 + 27) | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | | | | |
| 31 | Pendapatan Hibah | | | | |
| 32 | Pendapatan Dana Darurat | | | | |
| 33 | Pendapatan Lainnya | | | | |
| 34 | Jumlah Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah (31 s/d 33) | | | | |
| 35 | JUMLAH PENDAPATAN (7 + 28 + 34) | | | | |
| 36 | <u>BEBAN</u> | | | | |
| 37 | BEBAN OPERASI | | | | |
| 38 | Beban Pegawai | | | | |
| 39 | Beban Barang dan Jasa | | | | |
| 40 | Beban Bunga | | | | |
| 41 | Beban Subsidi | | | | |
| 42 | Beban Hibah | | | | |
| 43 | Beban Bantuan Sosial | | | | |
| 44 | Jumlah Beban Operasi (38 s/d 43) | | | | |
| 45 | | | | | |
| 46 | BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI | | | | |
| 47 | Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin | | | | |
| 48 | Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan | | | | |
| 49 | Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan | | | | |
| 50 | Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya | | | | |
| 51 | Beban Penyusutan Aset Lainnya | | | | |
| 52 | Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud | | | | |
| 53 | Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi (47 s/d 52) | | | | |
| 54 | | | | | |
| 55 | BEBAN TRANSFER | | | | |
| 56 | Beban Bagi Hasil | | | | |
| 57 | Beban Bantuan Keuangan | | | | |
| 58 | Jumlah Beban Transfer (56 s/d 57) | | | | |
| 59 | | | | | |
| 60 | BEBAN TAK TERDUGA | | | | |
| 61 | Beban Tak Terduga | | | | |
| 62 | Jumlah Beban Tak Terduga (61) | | | | |
| 63 | JUMLAH BEBAN (44 + 53 + 58 + 62) | | | | |
| 64 | | | | | |
| 65 | SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (35 - 63) | | | | |
| 66 | | | | | |
| 67 | <u>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</u> | | | | |
| 68 | SURPLUS NON OPERASIONAL | | | | |
| 69 | Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar | | | | |
| 70 | Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang | | | | |
| 71 | Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | | | | |
| 72 | Jumlah Surplus Non Operasional (69 s/d 71) | | | | |
| 73 | | | | | |
| 74 | DEFISIT NON OPERASIONAL | | | | |
| 75 | Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar | | | | |
| 76 | Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang | | | | |
| 77 | Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | | | | |
| 78 | Jumlah Defisit Non Operasional (75 s/d 77) | | | | |
| 79 | JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (72 - 78) | | | | |
| 80 | | | | | |
| 81 | SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (65 + 79) | | | | |
| 82 | | | | | |
| 83 | <u>POS LUAR BIASA</u> | | | | |
| 84 | PENDAPATAN LUAR BIASA | | | | |
| 85 | Pendapatan Luar Biasa | | | | |
| 86 | Jumlah Pendapatan Luar Biasa (85) | | | | |
| 87 | | | | | |
| 88 | BEBAN LUAR BIASA | | | | |
| 89 | Beban Luar Biasa | | | | |
| 90 | Jumlah Beban Luar Biasa (89) | | | | |
| 91 | POS LUAR BIASA (86 - 90) | | | | |
| 92 | | | | | |
| 93 | SURPLUS/DEFISIT LO (81 + 91) | | | | |

E.13 Neraca Pemerintah Daerah

PEMERINTAH KOTA DEPOK
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

| No. | Uraian | (Dalam Rupiah) | |
|-----|---|----------------|------|
| | | 20X1 | 20X0 |
| 1 | ASET | | |
| 2 | | | |
| 3 | ASET LANCAR | | |
| 4 | Kas dan Setara Kas | | |
| 5 | Kas di Kas Daerah | | |
| 6 | Kas di Bendahara Pengeluaran | | |
| 7 | Kas di Bendahara Penerimaan | | |
| 8 | Kas di BLUD | | |
| 9 | Kas Dana BOS | | |
| 10 | Kas Dana Kapitasi pada FKTP | | |
| 11 | Kas Lainnya | | |
| 12 | Setara Kas | | |
| 13 | Investasi Jangka Pendek | | |
| 14 | Piutang Pajak | | |
| 15 | Piutang Retribusi | | |
| 16 | Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | | |
| 17 | Piutang Lain-lain PAD yang Sah | | |
| 18 | Piutang Transfer Pemerintah Pusat | | |
| 19 | Piutang Transfer Antar Daerah | | |
| 20 | Piutang Lainnya | | |
| 21 | Penyisihan Piutang | | |
| 22 | Beban Dibayar Dimuka | | |
| 23 | Persediaan | | |
| 25 | Jumlah Aset Lancar (4 s/d 24) | | |
| 26 | | | |
| 27 | INVESTASI JANGKA PANJANG | | |
| 28 | Investasi Non Permanen | | |
| 29 | Investasi kepada BUMN | | |
| 30 | Investasi kepada BUMD | | |
| 31 | Investasi dalam Obligasi | | |
| 32 | Investasi dalam Proyek Pembangunan | | |
| 33 | Dana Bergulir | | |
| 34 | Jumlah Investasi Non Permanen (29 s/d 33) | | |
| 35 | Investasi Permanen | | |
| 36 | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | | |
| 37 | Investasi - Pemberian Pinjaman Daerah | | |
| 38 | Jumlah Investasi Permanen (36 s/d 37) | | |
| 39 | Jumlah Investasi Jangka Panjang (34 + 38) | | |
| 40 | | | |
| 41 | ASET TETAP | | |
| 42 | Tanah | | |
| 43 | Peralatan dan Mesin | | |
| 44 | Gedung dan Bangunan | | |
| 45 | Jalan, Irigasi, dan Jaringan | | |
| 46 | Aset Tetap Lainnya | | |
| 47 | Konstruksi dalam Pengerjaan | | |
| 48 | Akumulasi Penyusutan | | |
| 49 | Jumlah Aset Tetap (42 s/d 48) | | |
| 50 | | | |
| 51 | DANA CADANGAN | | |
| 52 | Dana Cadangan | | |
| 53 | Jumlah Dana Cadangan (52) | | |
| 54 | | | |

| | | | |
|----|--|--|--|
| 55 | ASET LAINNYA | | |
| 56 | Tagihan Jangka Panjang | | |
| 57 | Tagihan Penjualan Angsuran | | |
| 58 | Tuntutan Ganti Rugi | | |
| 59 | Kemitraan dengan Pihak Ketiga | | |
| 60 | Aset Tak Berwujud | | |
| 61 | Aset Lain - lain | | |
| 62 | Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud | | |
| 63 | Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya | | |
| 64 | Jumlah Aset Lainnya (56 s/d 63) | | |
| 65 | | | |
| 66 | JUMLAH ASET (25 + 39 + 49 + 53 + 64) | | |
| 67 | | | |
| 68 | <u>KEWAJIBAN</u> | | |
| 69 | | | |
| 70 | KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | | |
| 71 | Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | | |
| 72 | Utang Bunga | | |
| 73 | Utang Pinjaman Jangka Pendek | | |
| 74 | Bagian Lancar Utang Jangka Panjang | | |
| 75 | Pendapatan Diterima Dimuka | | |
| 76 | Utang Belanja | | |
| 77 | Utang Jangka Pendek Lainnya | | |
| 78 | Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (71 s/d 77) | | |
| 79 | | | |
| 80 | KEWAJIBAN JANGKA PANJANG | | |
| 81 | Utang kepada Pemerintah Pusat | | |
| 82 | Utang kepada Lembaga Keuangan Bank | | |
| 83 | Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank | | |
| 84 | Utang kepada Masyarakat (Obligasi) | | |
| 85 | Premium (Diskonto) Obligasi | | |
| 86 | Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (81 s/d 85) | | |
| 87 | JUMLAH KEWAJIBAN (78 + 86) | | |
| 88 | | | |
| 89 | <u>EKUITAS</u> | | |
| 90 | EKUITAS | | |
| 91 | JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (87 + 90) | | |

E.14 LP SAL Pemerintah Daerah

**PEMERINTAH KOTA DEPOK
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0**

(Dalam Rupiah)

| No. | Uraian | 20X1 | 20X0 |
|-----|---|------|------|
| 1 | Saldo Anggaran Lebih Awal | | |
| 2 | Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan | | |
| 3 | Subtotal (1 + 2) | | |
| 4 | Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) | | |
| 5 | Subtotal (3 + 4) | | |
| 6 | Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya | | |
| 7 | Lain - lain | | |
| 8 | Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7) | | |

E.15 LPE Pemerintah Daerah

**PEMERINTAH KOTA DEPOK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0**

(Dalam Rupiah)

| Uraian | 20X1 | 20X0 |
|--|------|------|
| Ekuitas Awal | | |
| Surplus/Defisit LO | | |
| Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar: | | |
| Koreksi Nilai Persediaan | | |
| Selisih Revaluasi Aset Tetap | | |
| Lain - lain | | |
| Ekuitas Akhir | | |

E.16 LAK Pemerintah Daerah

**PEMERINTAH KOTA DEPOK
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0
METODE LANGSUNG**

(Dalam Rupiah)

| No. | Uraian | 20X1 | 20X0 |
|-----|---|------|------|
| 1 | ARUS KAS DARI AKTIFITAS OPERASI | | |
| 2 | ARUS MASUK KAS | | |
| 3 | Penerimaan Pajak Daerah | | |
| 4 | Penerimaan Retribusi Daerah | | |
| 5 | Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | | |
| 6 | Penerimaan Lain - lain PAD yang sah | | |
| 7 | Penerimaan Dana Bagi Hasil | | |
| 8 | Penerimaan Dana Alokasi Umum | | |
| 9 | Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik | | |
| 10 | Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik | | |
| 11 | Penerimaan Dana Insentif Daerah | | |
| 12 | Penerimaan Dana Otonomi Khusus | | |
| 13 | Penerimaan Dana Keistimewaan | | |
| 14 | Penerimaan Dana Desa | | |
| 15 | Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi | | |
| 16 | Penerimaan Bantuan Keuangan | | |
| 17 | Penerimaan Hibah | | |
| 18 | Penerimaan Dana Darurat | | |
| 19 | Penerimaan dari Pendapatan Lainnya | | |
| 20 | Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 19) | | |
| 21 | ARUS KELUAR KAS | | |
| 22 | Pembayaran Pegawai | | |
| 23 | Pembayaran Barang dan Jasa | | |
| 24 | Pembayaran Bunga | | |
| 25 | Pembayaran Subsidi | | |
| 26 | Pembayaran Belanja Hibah | | |
| 27 | Pembayaran Belanja Bantuan Sosial | | |
| 28 | Pembayaran Tak Terduga | | |
| 29 | Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota | | |
| 30 | Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan ke Daerah Provinsi | | |
| 31 | Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa | | |

| | | | |
|----|---|--|--|
| 32 | Jumlah Arus Keluar Kas (22 s/d 31) | | |
| 33 | Arus Kas Bersih dari Aktifitas Operasi (20 - 32) | | |
| 34 | | | |
| 35 | <u>ARUS KAS DARI AKTIFITAS INVESTASI</u> | | |
| 36 | ARUS MASUK KAS | | |
| 37 | Pencairan Dana Cadangan | | |
| 38 | Penjualan atas Tanah | | |
| 39 | Penjualan atas Peralatan dan Mesin | | |
| 40 | Penjualan atas Gedung dan Bangunan | | |
| 41 | Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan | | |
| 42 | Penjualan Aset Tetap Lainnya | | |
| 43 | Penjualan Aset Lainnya | | |
| 44 | Hasil Penjualan Kekayaan Lain yang Dipisahkan | | |
| 45 | Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen | | |
| 46 | Jumlah Arus Masuk Kas (37 s/d 45) | | |
| 47 | ARUS KELUAR KAS | | |
| 48 | Pembentukan Dana Cadangan | | |
| 49 | Perolehan Tanah | | |
| 50 | Perolehan Peralatan dan Mesin | | |
| 51 | Perolehan Gedung dan Bangunan | | |
| 52 | Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan | | |
| 53 | Perolehan Aset Tetap Lainnya | | |
| 54 | Perolehan Aset Lainnya | | |
| 55 | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | | |
| 56 | Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen | | |
| 57 | Jumlah Arus Keluar Kas (48 s/d 56) | | |
| 58 | Arus Kas Bersih dari Aktifitas Investasi (46 - 57) | | |
| 59 | | | |
| 60 | <u>ARUS KAS DARI AKTIFITAS PENDANAAN</u> | | |
| 61 | ARUS MASUK KAS | | |
| 62 | Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat | | |
| 63 | Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain | | |
| 64 | Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank | | |
| 65 | Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank | | |
| 66 | Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah) | | |
| 67 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | | |
| 68 | Jumlah Arus Masuk Kas (62 s/d 67) | | |
| 69 | ARUS KELUAR KAS | | |
| 70 | Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat | | |
| 71 | Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain | | |
| 72 | Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank | | |
| 73 | Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank | | |
| 74 | Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah) | | |
| 75 | Pemberian Pinjaman Daerah | | |
| 76 | Jumlah Arus Keluar Kas (70 s/d 75) | | |
| 77 | Arus Kas Bersih dari Aktifitas Pendanaan (68 - 76) | | |
| 78 | | | |
| 79 | <u>ARUS KAS DARI AKTIFITAS TRANSITORIS</u> | | |
| 80 | ARUS MASUK KAS | | |
| 81 | Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | | |
| 82 | Jumlah Arus Masuk Kas (81) | | |
| 83 | ARUS KELUAR KAS | | |
| 84 | Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | | |
| 85 | Jumlah Arus Keluar Kas (84) | | |
| 86 | Arus Kas Bersih dari Aktifitas Transitoris (82 - 85) | | |
| 87 | | | |
| 88 | Kenaikan/Penurunan Kas (33 + 58 + 77 + 86) | | |
| 89 | Saldo Awal Kas | | |
| 90 | Saldo Akhir Kas (88 + 89) | | |

E.17 CaLK Pemerintah Daerah

PEMERINTAH KOTA DEPOK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

| PENDAHULUAN | |
|-------------|--|
| BAB I | Pendahuluan |
| | 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah |
| | 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah |
| | 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah |
| BAB II | Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD |
| | 2.1 Ekonomi makro |
| | 2.2 Kebijakan keuangan |
| | 2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD |
| BAB III | Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah |
| | 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah |
| | 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan |
| BAB IV | Kebijakan akuntansi |
| | 4.1 Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah |
| | 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah |
| | 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah |
| | 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pemerintah daerah |
| BAB V | Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah |
| | 5.1 Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah daerah |
| | 5.1.1 Pendapatan - LRA |
| | 5.1.2 Belanja |
| | 5.1.3 Pembiayaan |
| | 5.1.4 Pendapatan - LO |
| | 5.1.5 Beban |
| | 5.1.6 Aset |
| | 5.1.7 Kewajiban |
| | 5.1.8 Ekuitas Dana |
| | 5.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah |
| BAB VI | Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan pemerintah daerah |
| BAB VII | Penutup |

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS